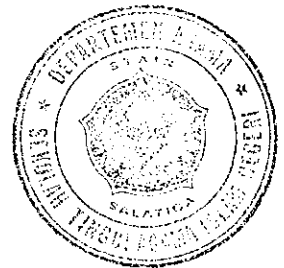


**KONFLIK HORIZONTAL NU-MUHAMMADIYAH
IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah**



Oleh :

Lailatul Arofah

NIM : 111.97.046

**JURUSAN TARBIYAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
TAHUN 2002**

Prof. Dr. H. Muh Zuhri, M.A.

Dosen STAIN Salatiga

Jln. Tentara Pelajar No. 02 Salatiga, Phone (0298) 323706, 323444, Pos 50712

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 3 eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. Lailatul Arofah

NIM: 111.97.046

Kepada Yth.

Ketua STAIN Salatiga

di-

SALATIGA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lailatul Arofah

NIM : 111.97.046

Jurusan/Progdi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam (PAI)

**Judul Skripsi : Konflik Horisontal NU-Muhammadiyah
Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam**

Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salatiga, 16 Januari 2002

Pembimbing


Prof. Dr. H.M. Zuhri, M.A.

NIP: 150 182 686

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SALATIGA**

Jl. Tentara Pelajar No. 2 Telp. (0298) 23433, 23706 Fax. 23433 Salatiga 50721

PENGESAHAN

Skripsi saudara : **LAILATUL AROFAH**, dengan Nomor Induk Mahasiswa : **111.97.046** yang berjudul : **“KONFLIK HORIZONTAL NU-MUHAMMADIYAH IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM”**. Telah dimunaqosahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga pada hari : Sabtu tanggal 12 Dzulqa'idah 1422 H, yang bertepatan dengan tanggal 26 Januari 2002 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat – syarat untuk memperoleh gelar **SARJANA** dalam **Ilmu Tarbiyah**.

12 Dzulqa'idah 1422 H
Salatiga, _____
26 Januari 2002 M

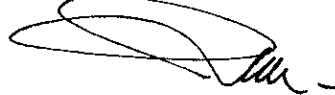
PANITIA UJIAN

KETUA SIDANG



Prof. DR. H. Muh Zuhri, MA
NIP. 150 182 686

SEKRETARIS SIDANG

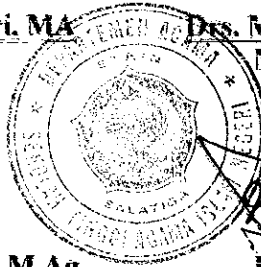


Drs. M. Zulfa Machasin M. Ag
NIP. 150 177 821

PENGUJI I



Drs. M. Zulfa Machasin M. Ag
NIP. 150 177 821



PENGUJI II



Drs. H. M. Banani
NIP. 150 170 134

PEMBIMBING



Prof. DR. H. Muh Zuhri, MA
NIP. 150 182 686

MOTTO

*"... Dan Berpeganglah kamu semuanya kepada Tali (Agama)
Allah, dan janganlah kamu bercerai berai..."*

(Q.S. Ali' Imran: 103)

*"...Dan Hendaklah ada di antara kamu
segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar, Merekalah orang-orang yang beruntung..."*

(Q.S. Ali' Imran: 104)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan teruntuk:

- Ibu Khusniah tercinta, yang tulus ikhlas memberi dukungan moral maupun material dari awal hingga akhir studi.
- (Alm.) Bapak Tarnan tercinta, Semoga Allah SWT. senantiasa mengampuni dosa dan menerima amal baik di sisi-Nya.
- Adik-adik tersayang Siti Khotijah, Slamet Asnoyo Wati, Tin Trisnawati, yang selalu kurindukan.
- *Dearest Mas Adi.S, May God Bless Us, I Hope So....*
- Buat temen-temen dan adik-adik di HMI yang telah memberi pendidikan dalam arti sesungguhnya menuju proses pendewasaan diri.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas segala berkah, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Beliau yang mulia Nabi Muhammad saw. Beliau lah yang telah menunjukkan jalan kebenaran abadi kepada kita, yaitu jalan agama Allah.

Penulisan skripsi ini diakui penulis membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun pengorbanan waktu tersebut mudah-mudahan dapat memberi nilai lebih dalam arti memperkaya khazanah keilmuan. Penulis berharap, skripsi ini dapat menyumbangkan sedikit perhatian pemikiran persoalan konflik NU–Muhammadiyah, khususnya kepada para tokoh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu, sehingga *ukhuwah islamiyah* dapat terwujud. Amin.

Akhirnya, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tulus kepada pihak–pihak yang terlibat dan membantu proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghormatan yang tinggi kami haturkan kepada:

- a. Bapak Prof. Dr. H. Muh Zuhri, M.A., selaku Ketua STAIN Salatiga dan juga selaku pembimbing skripsi.
- b. Bapak dan Ibu Dosen, selaku staff pengajar dan segenap karyawan yang turut membantu dan membimbing penulis.
- c. Bapak Tarnan (Alm.) dan Ibu Khusniyah tercinta, yang telah senantiasa mendidik penulis dengan kasih sayang.
- d. Bapak dan Ibu Kamstri beserta keluarga, terima kasih yang sebesar–besarnya penulis sampaikan, mudah–mudahan segala amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT.
- e. Mas Marno tercinta, yang selalu setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- f. Adik–adik tersayang, Tijah, Wati, Tintin, terimakasih atas segala kebersamaannya, mudah–mudahan kita slalu dalam lindungan-Nya.

- g. Adik–adik kost, Atun, Fita, Nurul, Laili, Ida, Ratna, Udhma, Umi, Wiwin, yang sudah menciptakan suasana kekeluargaan.
- h. Teman–teman tersayang dan kakak–kakakku yang saya banggakan, Isty Anyes, Ida, Inung, O'on, Fathur, Mas Rafiq, Mas Ramli, Mas Latif, Mas Ibnu, Mas Syaimuri, Bang Leman dan yang lainnya yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu.
- i. Pantas penulis haturkan penghargaan kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Salatiga, Mas Irul, Yusuf, Raghib, Mbak Heni, Harsono, Hafiah serta kawan–kawan sehimpunan tempat kita bersama–sama menapaki Insan Cita. Dan, untuk adik–adik HMI Komisariat Walisongo dan Ganesha, selamat berjuang menuju yang lebih baik.
- j. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulis.

Mudah–mudahan semua amal baik mereka yang telah disebutkan di atas mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT, yaitu pahala yang besar dan yang akan dipetik hasilnya besuk di akhirat. Amin.

Salatiga, 19 Januari 2002

Lailatul Arofah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Judul.....	7
C. Pokok Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sitematika Penulisan.....	11
Bab II : Konflik Horisontal NU-Muhammadiyah	
A. Sejarah Nu-Muhammadiyah.....	13
B. Faktor Konflik NU-Muhammadiyah.....	27
C. Implikasi Konflik NU-Muhammadiyah.....	32
Bab III : Perspektif Pendidikan Islam	
A. Konsepsi Umum.....	36
1) Definisi.....	40
2) Karakteristik.....	42
3) Orientasi.....	46
B. Tinjauan Historis.....	50
C. Pendidikan Islam Kontemporer.....	56
Bab IV : Konflik Horisontal NU-Muhammadiyah Implikasinya terhadap Pendidikan Islam	
A. Ketegangan-ketegangan.....	61
B. Faktor Integrasi.....	66

	C. Tantangan Pendidikan Islam.....	72
Bab V	: Penutup	
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77
	C. Penutup.....	78
SUMBER ACUAN.....		79
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....		82

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam dataran konseptual, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kepada pemeluk agamanya untuk mengumbar konflik. Sebab, pada dasarnya setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Kerinduan yang dalam terhadap cita-cita luhur kedamaian dan kerukunan menjadi impian setiap agama dan pemeluknya.

Akan tetapi, kondisi konseptual tersebut berbeda dengan kondisi faktual. Dalam kehidupan bermasyarakat di beberapa daerah di belahan dunia manapun agama seringkali dijadikan sebagai pemicu konflik. Tidak terkecuali hubungan beragama di beberapa daerah di Indonesia. Konflik antar umat beragama seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kenyataan seperti ini tidak jarang mencuat sebagaimana di ekspose pemberitaan oleh berbagai media massa. Semisal, konflik yang terjadi beberapa waktu lalu di Ambon, Maluku, Situbondo, Jepara, Pekalongan dan yang lainnya.

Menurut Fedyani Saifudin, konflik yang dipicu agama tersebut disebabkan oleh ajaran agama itu sendiri yang cenderung memberi doktrin berlebihan kepada penganutnya. Sehingga, perbedaan antar agama cenderung memicu konflik.¹

Ironisnya, fenomena sosial menunjukkan bahwa konflik agama tidak hanya dipicu oleh perbedaan agama. Sebab, persoalan yang sama juga sering dihadapi oleh kalangan internal umat beragama. Pemeluk agama Islam misalnya, meski mereka sama-sama mengaku sebagai penganut

¹ Achmad Fedyani Saifudin, *Konflik dan Integrasi Fahaman dalam Agama Islam*, Jakarta, CV Rajawali, 1986, hlm. 5.

agama yang satu, namun sering kali persoalan konflik tidak dapat dihindari begitu saja.²

Berawal dari keanekaragaman paham keagamaan, konflik di kalangan internal umat Islam mengalami ketegangan. Padahal, keanekaragaman paham tersebut semula disebabkan oleh perbedaan dalam menginterpretasikan sumber ajaran agama.³ Namun, perbedaan pemahaman itu akhirnya menjadi sumber potensi konflik.

Data empiris menunjukkan bahwa ketegangan dan konflik internal umat Islam yang terjadi di Indonesia tidak jarang dipicu oleh perbedaan paham keagamaan yang sudah menjadi institusi agama.⁴ Meski pada awalnya setiap institusi keagamaan tersebut mempunyai tujuan untuk melaksanakan ajaran agama Islam secara utuh dan konsekuen, namun, dalam dataran perilaku sering tereduksi dan memicu konflik.⁵

Jika dirunut ke belakang, beberapa institusi keberagaman umat Islam di Indonesia yang paling menonjol dan yang dikenal diantaranya adalah paham NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Sebagai pembeda dari keduanya terletak pada cara interpretasi terhadap bagian dan ajaran Islam. Perbedaan ini digunakan seolah-olah menciptakan dua struktur sosial yang berbeda dengan batasan-batasan yang jelas antara satu dan lainnya.

NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam di Indonesia yang mempunyai anggota terbesar. Meski demikian, hubungan keduanya sering

² Konflik internal umat Islam di Situbondo misalnya, termasuk perseteruan yang sangat unik. Kendati sesama penganut agama Islam, namun mereka bersitegang. Baca; M Ariyanto (ed.), *Melangkah dari Reruntuhan Tragedi Situbondo*, Jakarta, Grasindo PT Gramedia Widi Asarana Indonesia, 1998, hlm. 5.

³ Fedyani, *op.cit.*, hlm. 8.

⁴ Institusi atau lembaga agama di Indonesia yang membawa dan mengajarkan nilai agama antara lain, Nahdlatul Ulama' (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Al-rabithah Al-alawiyah. Selain institusi tersebut, dapat dijumpai bentuk organisasi-organisasi Islam yang tidak mengibarkan bendera paham keagamaan tetapi mempunyai "hubungan" dengan organisasi sosial politik (Orsospol). Semisal, Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Gabungan Usaha dan Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI) dan Al-hidayah. Kendati kelompok ini lebih menekankan pengembangan dakwah, pendidikan dan *ukhuwah*, akan tetapi dalam gerakan cenderung menjadi partisan terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya baca; Syamsudduha, *Konflik dan rekonsiliasi NU-Muhammadiyah*, Jakarta, PT Bina Ilmu, 1999, hlm.12.

⁵ Meski Nabi Muhammad saw bersabda bahwa, perbedaan diantara umat adalah rahmat, namun perbedaan selama ini cenderung diletakkan tidak pada proporsinya.

mengalami ketidak harmonisan. Tidak jarang perbedaan paham dua institusi agama tersebut mengarah dan memicu konflik. Sehingga, tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa konflik internal umat Islam di Indonesia didominasi oleh kedua anggota organisasi besar itu.

Mengapa demikian? Apakah para pemimpin dan anggota kedua organisasi NU dan Muhammadiyah sudah sedemikian jauh terbawa oleh sikap *ta'asub* (tegar hati atau fanatik).⁶ Ataukah ada sebab-sebab lain sehingga mereka seperti mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya, tentang arti penting *ukhuwah* (persaudaraan) menuju *wahdatul ummah* (persatuan umat).

Secara normatif, Islam sebagai agama *Ilahiyah* yang diturunkan Allah SWT melalui nabi Muhammad saw mengajarkan nilai kebaikan dan kebenaran. Kitab suci Antara lain-qur'an dan Hadits nabi diyakini sebagai kebenaran mutlak (*absolut truth*)⁷. Akan tetapi mengapa kerukunan internal umat Islam dapat menjadi lebih labil?. Padahal, begitu banyak ayat Al-qur'an dan Hadits yang mewajibkan menganjurkan dan menyerukan bagi umat Islam untuk menegakkan *ukhuwah* dalam kehidupan sesama umat Islam.⁸ Mengapa himbauan agama tersebut masih jauh dari perilaku penganutnya? Apakah umat Islam tidak lagi beriman kepada Al-qur'an dan nabi Muhammad saw, sehingga, mereka mengabaikan begitu saja ayat-ayat Al-qur'an dan Hadits?

Meskipun organisasi NU dan Muhammadiyah bukan organisasi politik praktis, karena keduanya mengklaim sebagai organisasi keagamaan, namun dalam menghadapi kelompok atau paham lain, para penganut kedua lembaga keagamaan itu cenderung menggunakan strategi politik. Sehingga

⁶ Sebagaimana dalam ayat Al-qur'an yang berbunyi bahwa tiap-tiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka masing-masing. Baca; QS. Al-mu'minun: 53 dan QS. Ar-rum: 32.

⁷ Yunar Ilyas, M. Mansyur Amin dan M. Daru Lasito (ed.), *Muhammadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Keislaman*, Jogjakarta, Aditya Media, 1995, hlm.38.

⁸ Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-hujarat: 6).

benar sebagaimana disinyalir Geertz bahwa penyebab konflik antara kelompok tersebut dikarenakan satu sama lain terdapat batasan-batasan yang makin jelas tatkala aspek politik dalam masyarakat mengimplikasikan perbedaan paham. Propaganda politik itu yang menyebabkan konflik diantara sesama warga masyarakat.⁹

Hal senada diungkap Victor I Tanja, Ia menyebutkan bahwa konflik agama dapat disebabkan karena perbedaan pemahaman yang dicampuri oleh faktor-faktor lain. Agama sering dijadikan sebagai legitimasi untuk meraih kepentingan politik. Oleh pihak-pihak yang bertikai ayat-ayat suci digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan keserakahan.¹⁰

Jika diamati di beberapa daerah di Indonesia dan pulau Jawa pada khususnya, konflik NU-Muhammadiyah terjadi secara sporadis. Ada kalanya anggota kedua organisasi tersebut bersikap saling enggan. Ada kalanya pula berjalan seiring dalam suasana *ukhuwah*. Bahkan tidak sedikit tokoh elite dari kedua organisasi itu yang mendambakan persatuan dan kesatuan umat Islam.¹¹ Para tokoh elite tersebut mengajak agar warga NU dan Muhammadiyah bersatu untuk meninggalkan segala bentuk persengketaan dan perpecahan.

Melihat indikasi permasalahan yang cukup memprihatinkan tersebut di atas, maka menurut penulis patut dijadikan sebagai obyek penelitian dan pengkajian. Penelitian dianggap penting agar dapat ditemukan faktor yang menyebabkan konflik serta faktor yang memungkinkan terwujudnya integrasi kedua institusi keagamaan tersebut pada khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Karena *background* pendidikan penulis adalah jurusan *Tarbiyah* (Pendidikan Islam), maka persoalan konflik NU-Muhammadiyah tersebut penulis maksudkan dapat ditarik faktor solutifnya melalui pendekatan

⁹ Sebagaimana tulisan Clifford Geertz dikutip Fedyani, *op.cit.*, hlm. 10.

¹⁰ Victor I Tanja, MTh, Ph.D, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial*, Jakarta, Pustaka Cidesindo, 1998, hlm. 207.

¹¹ KH Yusuf Hasim, *Sambutan Pengurus Besar NU*, Disampaikan dalam seminar NU-Muhammadiyah, Jogjakarta, 1993 dan KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Sambutan Pimpinan Muhammadiyah*, Disampaikan dalam seminar NU-Muhammadiyah, Jogjakarta, 1993.

pendidikan Islam. Sebab, pendidikan merupakan awal sebuah proses penanaman nilai yang dapat mempengaruhi perilaku manusia.

Meminjam istilah Achmadi, pendidikan merupakan usaha yang bertujuan normatif.¹² Tujuannya tidak lain bagaimana pendidikan mampu melahirkan seperangkat sikap dan perilaku moral manusia dan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Dr Muhammad SA Ibrahimy menyebutkan:

"Islamic education in true sense of learn is a system of education which enables a man to lead his life according to the Islamic Ideology. So, that he may easily mould his life in accordance with tenets of Islam."

Artinya, pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan hidupnya sesuai cita-cita Islam. Sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai Islam.¹³

Sedang Ali Ashraf mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih perasaan manusia dengan cara sebegitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan serta pendekatannya terhadap peningkatan pengetahuan dipengaruhi oleh nilai spiritual dan kesadaran nilai etis Islam.¹⁴

Karena itu, dapat dikatakan bahwa falsafah dasar, tujuan, serta prinsip dalam melaksanakan pendidikan Islam didasarkan atas nilai Islam yang terkandung dalam Al-qur'an dan Hadits.¹⁵

Dari berbagai definisi pendidikan Islam di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya pemindahan pengetahuan (*transfer of knowlargo*) dan nilai-nilai etis (*transfer of value*) oleh seorang pendidik kepada peserta didik berdasarkan ajaran Al-qur'an dan Hadits. Sehingga,

¹² Achmadi, *Islam Sebagai Pradigma Ilmu Pendidikan*, Jogjakarta, Aditya Media, 1992, hlm. 1.

¹³ H.M Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994, hlm. 3-4.

¹⁴ Dr. Syed Ali Ashraf, *Menyongsong Reruntuhan Pendidikan Islam*, Jakarta, Gema Falsafah, 1994, hlm. 1.

¹⁵ Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam*, Solo, Ramadhani, 1991, hlm.15.

Islam dapat menjadi kekuatan moral pandangan serta sikap dalam hidup peserta didik.

Islam tidak untuk dijadikan sebagai legitimasi kepentingan politik demi meraup kekuasaan. Sejarah selalu menunjukkan bahwa subordinasi agama atas kekuasaan justru berakibat pada hubungan ketercerabutan nilai agama itu sendiri. Ujung-ujungnya, sumber petaka dan konflik yang menjadi musuh semua agama *malah* menjadi bagian dari agama. Padahal, setiap agama tidak pernah mengajarkan pertikaian dan konflik.

Agama seharusnya dijadikan sebagai kekuatan moral dan tampil sebagai kritik sosial. Ruh suci agama harus tetap dijaga sebagai kekawatan yang terhindar dari kepentingan kekuasaan yang bersifat sesaat. Sehingga, cita-cita luhur nilai agama sebagai nilai perdamaian dapat terwujud.

Di sinilah sebenarnya tugas pendidikan Islam sebagai proses internalisasi nilai Islam dapat menempatkan makna ajaran secara proporsional. Pemahaman yang parsial terhadap kitab suci dapat menimbulkan persepsi yang timpang dan tidak adil terhadap pesan-pesan Al-quran yang bersifat universal. Untuk memahami Al-qur'an secara adil dan bertanggung jawab merupakan agenda serius lembaga pendidikan Islam.¹⁶

Banyak ayat Al-qur'an yang menyerukan persatuan umat manusia. Perbedaan suku, kulit, bangsa bahkan perbedaan paham keagamaan internal umat bukan satu penghalang untuk mewujudkan prinsip persatuan. Sebab, pada dasarnya semua penganut agama mempunyai tujuan hidup yang sama untuk mengabdikan kepada Tuhan.¹⁷

Dalam persepektif inilah, Islam seharusnya mampu tampil sebagai agama yang mengajarkan nilai keseimbangan antara realitas individu, masyarakat dan kemanusiaan.¹⁸ Persatuan dan kesatuan umat dapat berlangsung secara harmonis karena nilai-nilai kemanusiaan yang telah

¹⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan*, Jogjakarta, 1991, hlm. 21.

¹⁷ QS. Al-imran: 105 dan Al-ambiya': 92.

¹⁸ Ahmadi, *op.cit.*, hlm. 57-58.

disepakati bersama. Nilai kejujuran, keadilan, tolong menolong dan hormat-menghormati tidak hanya berdasar norma atau ukuran manusia. Akan tetapi berdasarkan norma transendental *Ilahiyah* yang memiliki kebenaran mutlak dan bersifat universal.

Tugas pendidikan Islam adalah untuk memproses jalannya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut sebagai upaya melesatarikan, menginternalisasikan serta mengaktualisasikan nilai-nilai *Ilahi* dalam kehidupan.

Dengan harapan, nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan moral, cara pandang (*way of life*) dan daya kreatifitas anak didik dalam menjalani kehidupan individu dan sosial. Sehingga, konflik dengan mengatasnamakan dan melegitimasi agama dapat tereliminir.

B. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi terhadap pembahasan konflik horisontal NU-Muhammadiyah implikasinya terhadap Pendidikan Islam, maka dipandang perlu untuk diberikan batasan serta penegasan istilah. Diharapkan, dari penegasan tersebut dapat dibangun wacana berangkat dari satu arah.

1. Konflik Horisontal

Konflik secara bahasa berarti percekocokan, perselisihan, pertentangan antara dua kekuatan. Yakni, pertentangan dari satu tokoh, dua tokoh dan sebagainya.¹⁹ Sedangkan horisontal dimaksudkan adalah hubungan antara instansi-intansi atau organisasi-organisasi yang setingkat.²⁰ Jadi, yang dimaksud konflik horisontal adalah percekocokan, perselisihan yang terjadi antara satu tokoh, dua tokoh dan sebagainya yang berpengaruh pada percekocokan di tingkat pengikut atau anggota organisasi atau institusi tertentu. Dalam hal ini, penulis maksudkan untuk

¹⁹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pendidikan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1990, hlm. 518.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

mencermati konflik horisontal yang terjadi pada organisasi NU dan Muhammadiyah.

2. NU

NU (Nahdlatul Ulama'), merupakan organisasi sosial keagamaan dengan ikatan-ikatan kekeluargaan. Dalam konstitusinya dinyatakan bahwa organisasi akan berhidmat pada kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan ekonomi. NU dibentuk oleh para ulama' (pimpinan pesantren) di Surabaya pada 31 Januari 1926. Konflik tajam antara kelompok reformis dan tradisional sebagai latar belakang berdirinya NU.²¹ Organisasi NU yang biasa disebut dengan kelompok tradisional ini, dalam kegiatan keagamaan merujuk pada madzab fiqih Syafi'i dan menolak ijtihad serta penafsiran sendiri atas Al-qur'an dan Hadits.²²

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi atau perserikatan dakwah Islam dengan misi utama *amar ma'ruf nahi munkar* (perintah kepada kebaikan dan melawan terhadap ketidakbenaran).²³ Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, di Jogjakarta pada 18 November 1912.²⁴ Organisasi ini menentang sikap *taqlid* (pengikut dengan cara membabi buta) dan *mudzhab* (aliran). Sebagai organisasi

²¹ Dr. Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Jogjakarta, LKiS dengan Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 18.

²² Menurut kelompok NU, adalah sangat berbahaya menggantungkan ajaran pada pemahaman Al-qur'an dan Hadits dari seorang yang bisa saja salah. Bagi orang-orang yang beriman bahkan ulama' sekalipun hanya dapat terhindar dari kesesatan bila mengikuti suatu madzab secara ketat. Selanjutnya baca: Greag Fealy dan Greag Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan NU-Negara*, Jogjakarta, LKiS, 1997, hlm. 142.

²³ Umar Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus Dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi, Pendidikan, Kritik dan Terapinya*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1991, hlm. 55.

²⁴ Junus Salam, *KH Ahmad Dahlan, Amal dan Perdjoeangannya*, Jakarta, Depot Pengadjaran Muhammadiyah, 1968, hlm. 1.

modernis, Muhammadiyah menganjurkan kepada umat Islam agar kembali pada sumber asli Al-qur'an dan Hadits.²⁵

4. Implikasi

Implikasi atau dalam bahasa Inggris "*implication*" berarti maksud dan pengertian yang sudah di dalamnya.²⁶ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, implikasi diartikan sebagai keterlibatan.

5. Pendidikan Islam

Adapun pendidikan Islam difahami sebagai bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.²⁷ Pendidikan Islam dapat dimaksudkan segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia dan sumber daya insani menuju terbentuknya insan kamil sesuai dengan norma Islam.²⁸ Atau dapat diartikan melatih perasaan murid-murid dengan cara sebegitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan dipengaruhi oleh nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam.²⁹

Sesuai dengan definisi tersebut di atas, pendidikan Islam dalam prosesnya tidak hanya sebatas pada kegiatan pengajaran (*transfer of knowlargo*), akan tetapi berorientasi pula pada penanaman nilai ke-Islaman (*transfer of value*) hingga menginternal dan terimplementasikan dalam perilaku dan sekaligus dapat menjadi *helper* bagi manusia.

Terikat fenomena konflik horisontal NU-Muhammadiyah, dalam hal ini dimaksudkan sejauh mana keterlibatan serta kontribusi pendidikan

²⁵ Martin, *op.cit.*, hlm. 25.

²⁶ John M.E Chols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1988, hlm. 131.

²⁷ Ahmad Marimba, *Pengantar Filsafat Islam*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1981, hlm. 23

²⁸ Ahmadi, *op.cit.*, hlm. 16.

²⁹ Syed Sajad Husein, *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*. Bandung, Gema Risalah Perss, 1994, hlm. I.

Islam terdapat faktor penyebab dan integrasi atas konflik horisontal antara penganut NU-Muhammadiyah. Bagaimana pula menyusun paradigma pendidikan Islam sebagai upaya mengeliminir konflik internal umat.

C. Pokok Masalah

Pokok masalah yang mendasari penulisan ini adalah;

1. Apa yang menjadi faktor penyebab konflik horisontal NU-Muhammadiyah.
2. Bagaimana respon pendidikan Islam di tengah konflik horisontal NU-Muhammadiyah.

D. Tujuan Penelitian

Secara ringkas tujuan penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut;

1. Mengetahui faktor penyebab konflik horisontal NU-Muhammadiyah.
2. Menemukan relevansi pendidikan Islam di tengah konflik horisontal NU-Muhammadiyah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian filsafat yang selalu berusaha menempatkan obyek sasaran atau *gegenstand* secara utuh, menyeluruh dan mendasar. Dengan demikian cara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, komparatif dan akhirnya analisis, sintesis.

Dengan cara deskriptif,³⁰ digambarkan mengenai *background* masing-masing antara NU-Muhammadiyah yang ditinjau secara normatif-historis. Baik ditinjau dari sisi ontologis maupun epistemologis. Pada sisi lain, perlu juga digambarkan mengenai pendidikan Islam ditinjau secara historis dan

³⁰ Metode deskriptif yaitu perumusan filsafat tersembunyi dideskripsikan sedemikian rupa sehingga terus menerus ada referensi pada masalah konkret dengan detail-detailnya. Lihat: Anton Backer dan Ahmad Haris Zubeir, *Methodologi Penelitian Filsafat*, Jogjakarta, Kanisius, 1994, hlm. 110.

sisi aksiologisnya.

Dengan pendekatan komparatif,³¹ dimaksudkan untuk menghadapi antara NU-Muhammadiyah ditinjau dari persamaan dan perbedaan. Kemungkinan munculnya faktor konflik dan sikap antagonisme antar keduanya yang menyebabkan ketegangan-ketegangan. Di sisi lain, sejauh mana posisi pendidikan Islam mempunyai keterlibatan terhadap konflik horisontal NU-Muhammadiyah tersebut.

Pendekatan analisis,³² dipergunakan untuk pembahasan secara kritis setelah terkumpul data-data yang diperlukan mengenai konflik horisontal yang terjadi pada penganut NU-Muhammadiyah. Selanjutnya, sejauh mana kontribusi pendidikan Islam sebagai upaya menciptakan kerukunan internal umat Islam di Indonesia melalui instrumen pendidikan Islam.

Sintesis,³³ dimaksudkan bahwa kesimpulan diambil dari berbagai pengetahuan yang diperoleh untuk mendapat kerangka pencapaian tujuan serta manfaat. Dalam hal ini diharapkan dapat ditemukan rumusan faktor integrasi antara NU-Muhammadiyah, diantaranya melalui instrumen pendidikan Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka penulis jabarkan dalam sistematika sebagaimana berikut. Bab I meliputi Pendahuluan; Latar Belakang Masalah, Penegasan Judul, Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab II membahas Konflik

³¹ Metode komparatif dimaksudkan adalah varian-varian, prinsip-prinsip dan dasar filsafat tersembunyi terus menerus dihubungkan dengan data-data konkrit yang salah didiskripsikan. *Ibid.*, hlm. 111.

³² Metode analisis maksudnya, suatu cara penanganan terhadap obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilih-milih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk mendapatkan pengertian yang baru. Lihat: S. Sumargono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jogjakarta, Nur Cahaya, 1983, hlm. 21.

³³ Sintesis yaitu, cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan jalan mengabung-gabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk mendapat pengertian yang baru, *Ibid.*, hlm. 21.

Horisontal NU-Muhammadiyah; Sejarah Nu-Muhammadiyah, Faktor Konflik NU-Muhammadiyah, Implikasi Konflik NU-Muhammadiyah.

Bab III berisi tentang Perspektif Pendidikan Islam; Konsepsi Umum terdiri dari Definisi, Karakteristik, Orientasi, dilanjutkan Tinjauan Historis dan Pendidikan Islam Kontemporer. Bab IV membahas Konflik Horisontal NU-Muhammadiyah Implikasinya terhadap Pendidikan Islam; meliputi Ketegangan-ketegangan, Faktor Integrasi dan Tantangan Pendidikan Islam. Sedangkan Bab V berisi Penutup; Kesimpulan, Saran dan Penutup.

BAB II

KONFLIK HORIZONTAL NU-MUHAMMADIYAH

I Sejarah NU-Muhammadiyah

A. Sejarah Berdirinya NU

Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jumlah anggotanya diperkirakan mencapai 35 juta orang.¹ NU didirikan di Surabaya oleh KH Hasyim As'ari, tanggal 31 Januari 1926 M bertepatan 16 Rajjab 1334 11. Perkumpulan (*jam'iyah*) ini dilatarbelakangi oleh perkembangan tradisi keagamaan yang telah lama mengakar.²

Menurut Martin Van Bruinessen, berdaya organisasi NU yang disokong oleh para ulama' tersebut sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktifitas kelompok Islam reformis, Semisal Muhammadiyah dan kelompok modernis yang aktif dalam gerakan politik SI (Syarikat Islam).

Di sini nampak bahwa aktifitas Muhammadiyah dan SI merupakan faktor yang penting berdirinya NU, meski faktor dominan dipengaruhi oleh perkembangan internasional yang memberikan alasan langsung bagi berdirinya organisasi tersebut.³

Karenanya, tidak telalu berlebihan jika dikatakan bahwa NU, mungkin, tidak akan pernah dikenal jika kelompok pembaharu Islam, terutama SI dan Muhammadiyah, di tahun 1925 dan 1926 memberi tempat kepada para kiai tradisional dalam komite Khilafat. Karena kecewa diperlakukan tidak layak dalam komite tersebut, para kiai membentuk komite Hijaz. Dalam pertemuan itu membahas siapa yang didelegasikan untuk menghadap Raja Abdul Azis bin Su'ud, penguasa pemerintah Saudi Arabia.

¹ Greg Fealy-Greg Barton Ced. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan NU-Negara*, Jogjakarta, 1997 hlm XII.

² A Gafar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Jogjakarta, LKIS dan Pustaka Pelajar, 1995, hlm 47.

³ Martin Van Bruinessen, *Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Jogjakarta, LKIS Pustaka Pelajar, 1994 him. 18.

Komite Hijaz menyampaikan pesan yang berisi pertama, meminta kepada Raja Ibnu Su'ud agar tetap memberlakukan kebebasan bermadzhab empat. Yakni, Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kedan, memohon tetap diramaikannya tempat - tempat bersejarah. Tujuannya adalah memperjuangkan kepentingan Islam tradisional.⁴

Di sisi lain, berdirinya NU dapat dikatakan sebagai ujung perjalanan dan perkembangan gagasan-gagasan yang muncul dikalangan ulama di perempat abad 20 M. Diawali dengan Nahdlatul Tujar tahun 1918, Taswirul Afikar tahun 1922, kemudian Nahdlatul Watan tahun 1924. Maka, dapat dikatakan bahwa bangunan NU di dukung oleh tiga pilar utama yang bertumpu pada kesadaran keagamaan Ahlussunah Waljamaah, yaitu, wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan, sosial, budaya, dan wawasan kebangsaan.⁵

Dalam anggaran dasar organisasi ini dijelaskan bahwa keberadaan jamiyah NU yang beraqidah *diniyah Islamiyah* yang berasaskan Islam menurut paham *Ahlussunah waljamaah*. Secara eksplisit dapat dikatakan sebagai penganut nabi Muhammad dan *ijma'* ulama.⁶ Organisasi ini biasa disebut sebagai organisasi tradisional dengan mengikuti salah satu madzab empat. Dalam kegiatan merujuk pada fiqh imam Syafli dan menolak ijtihad serta penafsiran sendiri atas Alqur'an dan Hadits sebagai langkah dalam tugas memelihara, mengembangkan dan mengamalkan Islam ala *ahadil madzahibil arbah* dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Dalam perkembangannya, sejarah NU dapat diidentifikasi dalam tiga fase, yaitu periode awal, sebagai organisasi sosial keagamaan. Periode tengah, berfungsi juga sebagai partai politik dan fase terakhir kembali ke aktifitas sosial keagamaan (*khittah*).⁷

⁴ Baca Andre Fellard *NU Vis a Vis Negara*, Yogyakarta, LKiS, 1999, hlm. 11-12.

⁵ Hasil Mukhtamar NU XXX di Lirboyo Kediri Jatim 21-27 November 1999.

⁶ A Ohaffar, *op cit*, him 41.

⁷ Greg Feally Greg Borton (ed.), *loc. cit*.

Perjalanan sejarah NU mengalami berbagai perubahan di tengah proses pembangunan bangsa Indonesia. Pada awal berdirinya sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan, kemudian bersama organisasi lain membentuk MIAI (Majlis Islam Ala Indonesia), yang pada tahun 1930-an berganti nama Masyumi.⁸

Hubungan harmonis di dalam wadah Masyumi tersebut hanya mampu bertabah hingga tahun 1952. Kiranya hal ini disebabkan posisi NU kurang diuntungkan. Sehingga, dengan kondisi yang demikian kyai Wahab Hazbullah selaku *Rais Am* pada tahun 1950-an, menyatakan untuk mendirikan partai politik sendiri. Pada muktamar di Palembang April 1952, NU resmi memisalkan diri dari Masyumi.⁹

Setelah NU secara tegas menyatakan memisahkan diri dari Masyumi kemudian tampil ke gelanggang politik atas nama dirinya sendiri dengan nama-nama "Partai NU". Tujuan partai ini untuk menegakkan Syariat Islam yang berhaluan salah satu dari empat madzhab, (Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi), serta melaksanakan berlakunya hukum Islam dalam masyarakat.¹⁰

Keluarnya NU dari Masyumi memungkinkan organisasi ini untuk lebih mengaktualisasikan dirinya sendiri. Terbukti, dalam prestasinya pada pemilu pertamanya tahun 1955, dengan persiapan yang sangat singkat di bandingkan dengan partai lain, mampu menempati peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. NU mampu meraih dukungan 18,4 persen suara dari 45 kursi di parlemen.¹¹

Perkembangan selanjutnya, NU terlibat langsung dalam pasang surutnya perpolitikan nasional. Pemilu pertama di masa orde baru dan pemilu kedua dalam sejarah Indonesia merdeka tahun 1971, NU memperbaiki prestasinya

⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

⁹ Andree Fellard, *Op. cit.*, hlm. 44-45, dan Ahmad Suaedy, Ulil Abshar Abdalla (ed.), *Gila Gus Dur*, Jogjakarta, LKiS, 2000, hlm. 152.

¹⁰ Andree Feliard, *Ibid.*, hlm 46.

¹¹ A Ghaffar Karim, *op cit*, hlm 5.

dengan 18,67 persen suara dari 58 kursi di parlemen. Dengan demikian, tercatat menempati urutan kedua setelah Golkar.

Peran ini berakhir setelah ada kebijakan penyerdehanaan partai pada tahun 1973. Empat partai Islam (NU, Parmusi, Perti dan PSII) bergabung dengan nama PPP (Partai Persatuan Pembangunan), yang kemudian diikuti lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 1975, yang mengatur hanya ada tiga organisasi politik yang diakui.¹²

NU merupakan partai yang jauh paling besar di banding dengan partai-partai lain yang tergabung dalam PPP. Bagi NU peleburan diri dalam PPP itu seperti kembali ke masa menjadi bagian dari Masyumi.¹³ Karena dapat diramalkan adanya problem dan konflik lama muncul ke permukaan. Kecuali seandainya kepentingan antara kekuatan masa pendukung yang besar dengan jumlah politisi yang duduk di kursi kekuasaan dapat diatasi dengan baik

Pada Mukhtamar ke-26 di Semarang sudah tampak tanda - tanda kembali pada citra aslinya. Namun karena sayap NU masih berperan dalam bentuk visi, maka konsep pemikiran tersebut sulit untuk diharapkan sebagai kenyataan yang berarti. Di sini nampak kelenturan atau elastis proses perjalanan NU di tengah-tengah kondisi yang mengitari bangsa Indonesia, adalah kondisi yang menghendaki NU tampil sebagai organisasi sosial keagamaan.

Akhirnya NU kembali melakukan penilaian kapasitas organisasinya. Dari hasil perenungan inilah NU pada keputusan untuk kembali kepada bentuk sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, yang secara retorik sejak Mukhtamar ke-27 dirumuskan sebagai kembali ke khittah 1926.¹⁴

Kembalinya NU khittah pada tahun 1926 dapat dilihat dalam petunjuk Statuen Perkompoelan Nahdlatul Oelama pasal 3. Maksud didirikannya NU adalah untuk para ulama yang berhaluan *Ahlussunah Waljamaah* dibarengi

31. ¹² S.Sinasari Ecip, Said Budairy (ed.). *NU Khiffah dan Godaan Politik*, Bandung. Mizan. hlm.

¹³ Martin Van Bruinessen, *op. cit.*, hlm. 103.

dengan berbagai ikhtiar mengadakan penelitian, pengadaan kitab-kitab agama, pendidikan, dakwah, santunan fakir miskin, anak yatim, serta usaha-usaha memajukan pertanian, perdagangan atau usaha yang tak dilarang syariat Islam.

Bunyi pasal tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi NU yang selama ini terlalu memberikan tekanan berlebihan dalam aktifitas politik yang kurang terarah dan nyaris tak terkendalikan. Sehingga menyebabkan kerugian di bidang pendidikan, keagamaan dan tugas lainnya.

Munas di Situbondo, Jawa Timur, para ulama sepakat bahwa pokok-pokok pikiran khittah harus dipulihkan dengan kalimat pertamanya bahwa NU adalah jamiyyah diniyyah Islamiyah. Sehingga secara implisit menyatakan bahwa NU bukan sebuah organisasi politik. Kesepekatan ini dirumuskan dalam teks yang hanya memuat alinea singkat tentang hubungan NU dengan politik.

"Hak politik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota Nabdiatul Ulama. Tetapi, NU bukan merupakan wadah bagi politik praktis. Penggunaan hak berpolitik dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada dan dilaksanakan dengan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga tercipta kebudayaan politik yang sehat. Nahdlatul Ulama menghargai warga negara yang menggunakan politiknya secara baik bersungguh sungguh dan bertanggung jawab....."¹⁵

Kembali NU ke khittah 1926, mengisyaratkan bahwa NU tidak lagi aktif dalam politik praktis. Bahkan secara tegas memutus hubungan dengan PPP sebagai satu-satunya tempat penyaluran aspirasi politik. Sudah semestinya NU melakukan gerakan *back to basic* dengan mengembalikan peran sentral ulama dalam membangun pemikiran dan perilakunya secara konsisten pada khittah.¹⁶

¹⁴ A Ghaffar Karim *op. cit.*, hlm 93 dan S. Sinasari Ecip (ed.) *op.cit.*, hlm 31.

¹⁵ Martin Van Bruinessen, *op cit.*, hlm 127-128.

¹⁶ konsistensi pada khittah berarti konsistensi dengan seniralisasi organisasi dan gerakan Nahdliyyin pada ratwa dan kebijakan ulama. Selanjutnya baca Eep Saefulloh Faffah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1998, hlm 17.

Tentang pemulihan khittab NU 1926, ada empat dimensi yang berkaitan dengan agama, sosial, politik dan ekonomi. Tiga dimensi pertama (agama, sosial, ekonomi) merupakan roh dari khittab NU 1926. Sedangkan dimensi politik mengacu pada gerakan NU dalam sejarah perjalanannya seperti siasat dalam menghadapi penjajah sampai kesepakatan organisatoris NU tentang Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara.¹⁷

Bagaimana membangun kesadaran masyarakat selaku warga negara untuk secara aktif terlibat memikirkan masalah keadilan sosial, ekonomi, politik. Peran demikian pada dasarnya merupakan aktualisasi dari kancah politik praktis. Hanya saja peran politik yang digeluti sekarang adalah pergulatan politik yang berskala mondial yang tidak tersekat oleh bagian – bagian sektarianisme.

Amal Usaha NU

1. Bidang Pendidikan

Peranan dan sumbangan NU serta keterlibatannya para tokoh dalam rangka ikut serta mencerdaskan bangsa dan membina mental keagamaan masyarakat sangatlah besar.¹⁸ Salah satu bentuk riilnya adalah usaha di bidang pendidikan yang ditangani oleh lembaga pendidikan ma'arif.¹⁹

Sebagai organisasi dakwab, NU memiliki dua macam corak program pendidikan. Yaitu, pesantren dan non pesantren yang terbagi atas sekolah umum dan madrasah serta perguruan tinggi. Pelaksanaannya di tangani oleh lembaga pendidikan ma'arif yang merupakan bagian dari perangkat organisasi NU. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran formal maupun non formal.

¹⁷ Laude Ida, *Gerakan Sosial NU Pasca Gus Dur Memoteret NU Mencari Alternatif* Yogyakarta, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) dan The Asia Foundation, 1999, hlm. 5.

¹⁸ Materi Dasar NU Kelas 1, Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif Jateng, 1994, hlm. 18.

¹⁹ Syamsudduha, *op. cit.*, hlm. 51.

Secara rinci pendidikan yang berada dalam naungan lembaga pendidikan ma'arif meliputi pesantren, madrasah, dan sekolah umum (SMK NU, atau SMU NU). Dari ketiga jenis pendidikan ini diupayakan dan dikembangkan kualitasnya secara konsisten dan kontinyu. Sehingga menjadi sekolah unggulan sesuai harapan dan tantangan zaman. Sementara pesantren dalam kalangan NU dibina oleh RMI (*Rahithah Ma'ahad Al-Islamiah*).

Dalam bidang pendidikan ini didasarkan pada Alqur'an Surat Al-Mujadalah, ayat 11.²⁰ Tentunya dengan semangat kewajiban yang diperintahkan agama dan keharusan sejarah dengan tidak meninggalkan ajaran Islam yang berhaluan ahlusunnah waljama'ah.²¹

2. Bidang Sosial kemasyarakatan

Sekitar tahun 1977, NU telah mendirikan sebuah lembaga kemaslahatan keluarga NU (LKNU). Lembaga ini sebagai kelanjutan dari yayasan muslimat yang lebih dulu bergerak menangani masalah-masalah kependudukan dan keluarga berencana tahun 1969. Dalam realisasinya telah berhasil menyelenggarakan berbagai loka karya tentang keluarga berencana dan kependudukan.

Selain itu juga bergerak dibidang sosial kemasyarakatan seperti mendirikan dan mengelola rumah sakit, panti asuhan, balai kesehatan untuk ibu dan anak serta memelihara fakir miskin.²² Secara struktural, bidang sosial kemasyarakatan ini ditangani oleh pengurus bagian *mabarod* atau lembaga sosial kemasyarakatan, yang bergerak di bidang sosial bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan beradab.

3. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ini ditangani oleh pengurus bagian muamalah yang

²⁰ Maka Allah akan mengangkat mereka yang beriman dianiara kalian dan berilmu pengelahuan beberapa derajat....".

²¹ Drs H.M Djamilun Thohuri BA, *Pelajaran ke-NU-an kelas 2 SLTP Ma'arif Jateng*, Semarang, CV Wicaksono, 1988, hlm 9..

²² *Ibid.*

merupakan bagian dari organisasi NU. Tugasnya, memberikan bimbingan dan dorongan kepada warganya serta memberikan pendidikan dalam usaha meningkatkan kegiatan dan kemampuan ekonomi warga NU. Bimbingan dimaksudkan agar dalam mengupayakan ekonomi tidak melalaikan kewajiban dan anjuran agama, seperti zakat fitrah, sodaqob, infaq dan sebagainya.

Bidang ekonomi ini selalu berpangkal pada firman Allah, artinya; "Hal manusia, makanlah rizki Allah yang halal lagi baik untuk tubuhmu serasi dan menyehatkan yang ada di bumi dan janganlah mengikuti rayuan - rayuan syetan karena syetan itu musuh yang nyata," Al-Baqarah ; 168.

B. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah (MD) tidak lepas oleh faktor pengaruh gerakan pembaharuan dan kebangkitan Islam di Timur Tengah. Pengaruh ide dan gerakan di Timur Tengah merupakan hal yang sangat penting. Deliar Nur menyatakan bahwa bangkitnya MD dipengaruhi gerakan reformasi dari Timur Tengah, seperti kota Mekah dan Kairo yang menjadi pusat studi Islam.²³

Pengaruh ini dibawa melalui orang-orang yang melakukan ibadah haji kemudian menetap di Mekkah untuk beberapa waktu. Di Mekkah mereka mempelajari beberapa aspek ajaran Islam, terutama bidang fiqh. Sementara di Kairo, ide reformasi Muhammad Abdub telah menyebar ke hampir seluruh negara Islam, melalui majalah Al-Manar. Di Indonesia majalah ini banyak yang membaca, bahkan menurut Deliar Noer, sebagian dikutip kembali oleh beberapa penerbitan yang memiliki ide yang sama dengan Al-Manar. Seperti majalah Al-Imam, Neraca, Tanah Melayu dan Al-Manir di Padang.²⁴

²³ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1980, hlm 316.

²⁴ *Ibid*, hlm. 41.

Sementara itu realitas sosial umat Islam di Indonesia (khususnya Jawa) yang diawali abad XIII Masehi, diwarnai adanya sinkretisasi antara kepercayaan tradisional mistik yang dijiwai agama Hindu dan Budha. Dalam pengertian ini, Yusran Asrofi menggarisbawahi bahwa penduduk percaya selain manusia, binatang dan tumbuhan juga memiliki jiwa. Mereka percaya orang yang telah meninggal punya pengaruh kuat dan langsung terhadap orang yang masih hidup.²⁵

Masyarakat berkeyakinan bahwa orang yang telah meninggal beberapa hari kemudian didekat rumahnya ada suara harimau atau hewan lain di tengah malam. Sebab, orang yang telah meniaggal tersebut menjadi hewan jadi-jadian. Dengan demikian, masyarakat meyakini ada hubungan antara manusia dengan nenek moyang binatang. Kepercayaan semacam ini oleh Hamka dinamakan totemisme.²⁶

Latar belakang keagamaan ini dipengaruhi proses perkembangan Islam dilakukan secara adaptasi dengan pendekatan budaya. Misalnya, lambang budaya lokal sebagai media penyampaian dakwah menggunakan wayang kulit. Penyebaran Islam yang dilakukan para Wali ke daerah pedesaan menggunakan metode akulturasi dan sinkretasi. Taulik Abdullah mencontohkan suasana yang demikian itu berarti Islam tidak hanya menjinakan sasarannya tapi juga harus menjinakkan dirinya.²⁷ Hamka menilai bahwa kondisi ini melahirkan Islam dengan corak tersendiri. Islam yang memuja kuburan Wali dan sebagainya.²⁸

Melalui ajaran tasawuf saudagar India ini, tampaknya masyarakat mudah menerima Islam. Fenomena tersebut tepat apa yang dikatakan Hany J Benda, yang mensinyalir seandainya Islam datang langsung dari Timur Tengah dan kepercayaan monoteisme, mungkin tidak akan menemukan tempat untuk

²⁵ M Yusron Asrofi, *KH Ahmad Dahlan. Pemikiran dan Kepemimpinannya*, Jogjakarta, Hadinita 1983. hlm. 21.

²⁶ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang 1981, hlm. 21.

²⁷ Taufiq Abdullah, *Islam di Indonesia*, Jakarta, Tinta Mas, 1974, hlm. 35-36.

²⁸ Hamka, *Ta'sawuf Perkembangan dan Pemurniannya*, Jakarta, Panji Mas, 1980, hlm. 237.

memasuki Indonesia terutama Jawa.²⁹ Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, ajarannya telah dirasuk khuraffat dan bid'ah. Salah satu bentuk khuraffat yang meluas dikalangan masyarakat adalah pengeramatan kuburan suci. Biasanya orang ziarah ke kuburan bukan mengingat akan dirinya yang suatu saat akan tiada, tetapi meminta doa restu atau pertolongan dari ruh orang yang telah meninggal dunia.

Melihat realita yang mengelilingi ini, Ahmad Dahlan terdorong untuk mendirikan MD. Nama Muhamadiyah menurut asal katanya diambil dari bahasa arab, yakni nama rasul Muhammad saw pembawa risalah Islam. Muhammad berarti penjenisan atau penyerupaan atau pengidentifikasi. Muhammadiyah disebutkan sebagai orang-orang Islam yang hidup dimasa dan sesudah nabi Muhammad saw yang mengikuti segala sunah dan ajaran Islam.³⁰

Yang mendorong berdirinya MD tentang pemahaman Ahmad Dahlan terhadap wahyu khususnya ayat 104 surat AlAmran dan realitas sejarah yang mengandung makna agar setiap muslim menyatukan diri dalam gerakan dakwah amar ma'aruf nahi mungkar untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kesengsaraan dan kemelaratan.

Keberadaan MD yang kini berusia 90 tahun, dalam sejarah kelahirannya tidak terlepas peran dan ide besar Ahmad Dahlan. Menurut Saifullah, akar pemikiran kelahiran MD tampak pada aspirasi Ahmad Dahlan. Aspirasi itu dapat diungkapkan dari perjalanan intelektual, spiritual dan sosial, setelah menunaikan ibadah haji tahun 809, pada usia ke 20 tahun.³¹

Djindar Famimy menjelaskan bahwa perolehan ilmu Ahmad Dahlan menggunakan kontemplasi (perenungan yang berujung pada aksi-aksi sosial) Ahmad Dahlan bertambah gelisah ketika melihat tarik-ulur antara pengalaman

²⁹ Harry J Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Jakarta, Pustaka Jaya, 1980, hlm. 30-31.

³⁰ Margono Poespo Soewarno. *Gerakan Islam Muhammadiyah*, Jogjakarta, Persatuan Offset, 1995, hlm.26.

³¹ Saifullah, *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta, Grafiti, 1997, hlm 27.

intelektual di satu sisi dengan mengkaji Islam transformatif nabi Muhammad saw, dalam sejarahnya mampu mengadakan perubahan masyarakat Arab. Sementara Islam di Indonesia tidak mampu mendorong pemeluknya bangkit dari keterbelakangan. Pemikiran Ahmad Dahlan mulai mempersiapkan diri mewujudkan cita-cita menghapus kegelapan yang ada di daerahnya. Jogjakarta. Ahmad Dahlan memulai langkah pertama merubah arab kiblat.

Menurut Djindar Tamimy, perolehan wawasan Islam pendiri Muhammadiyah ini sebagai berkah hajinya teraktualisasi dalam tiga aktivitas keagamaan yang bermuatan ajaran Islam yang menghebohkan masyarakat Jogjakarta. Yaitu, prakarsa pertemuan ulama dalam kawasan Jogjakarta tentang kiblat shalat, masain shaf atau garis shalat serta pembangunan dan pembongkaran mushola.³²

Ahmad Dahlan dalam menafsirkan Alqur'an tidak berhenti sampai pada teori saja. Tetapi dilanjutkan pada tataran praksis, yaitu melakukan aksi kemasyarakatan. Metode pemahaman dan pengamalan Islam dalam pandangan Ahmad Dahlan adalah rasional dan fungsional. Rasional dimaksudkan menelaah sumber utama ajaran Islam dengan kebebasan akal pikiran dan kejenihan hati nurani. Sedangkan fungsional merupakan kelanjutan dan tuntutan hasil pemahaman dalam aksi sosial melakukan perbaikan.

Hakikat Islam yang sebenarnya menurut Ahmad Dahlan adalah konsepsi hidup yang dalam Alqur'an sering disebut risalah Allah SWT menciptakan manusia di bumi tidak sekedar main-main. Tetapi mempunyai program tertentu. Konsekuensinya, Allah menggambarkan program tersebut kepada manusia melalui risalah Islam kepada manusia supaya hidup dan berkehidupan di dunia selaras dengan yang dikehendaki-Nya dan diridhoi-Nya. Hakikat Islam yang di pahami Ahmad Dahlan menuntut pengalaman karena Islam sebagai konsepsi hidup maka pengalamannya tidak sekedar dilaksanakan secara individu Selain

³² *Ibid*, hlm.6.

untuk diri sendiri manusia juga diwajibkan menegakkan Islam di tengah-tengah masyarakat.

Amal Usaha Muhammadiyah

1. Bidang Keagamaan

Terhentuknya Majelis Tarjih pada tahun 1927, merupakan manifestasi cita-cita untuk menunaikan Islam secara murni. Fungsi utamanya adalah merumuskan kembali Islam yang sebenarnya untuk dijadikan pedoman dalam mengamalkan dan penerapannya, baik oleh pimpinan dan anggota.³³

Majelis Tarjih ini merupakan suatu lembaga yang menghimpun ulama-ulama Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa keagamaan. Majelis juga memberi tuntunan mengenai hukum yang sangat bermanfaat bagi khalayak umum.³⁴ Hasil penelitian Fathurrahman Djamil, MD berkeyakinan pada sumber ajaran Islam Alqur'an dan hadits shahih. Artinya bahwa segala persoalan yang muncul pada saat itu harus dikembalikan pada kedua sumber tersebut.³⁵

Usaha yang dilakukan bidang keagamaan MD ini pada sendi kenegaraan akhirnya terbentuk departemen agama Republik Indonesia. Terbukti, menteri agama pertama dipercayakan kepada tokoh Muhammadiyah, Moch Rosyidi BA. Selain ini, usaha-usaha penyempurnaan pengangkutan jamaah haji Indonesia tidak lekang dari KH Syuja' sebagai tokoh PKU Muhammadiyah.³⁶

³³ Rusli Karim (ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*, op. cit., hlm. 40.

³⁴ Drs. Mustafa Kamal Pasha (ed.), *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, Jogjakarta, LPPI UMY, 2000, hlm. 88.

³⁵ Drs. H. Fatkhurrahman Djamil, MA, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos, 1995, hlm. IX.

³⁶ Abdul Munir Mulkan, *Pemikiran KH Achmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 35.

2. Bidang Pendidikan

Alasan didirikannya Muhammadiyah diantaranya karena lembaga pendidikan di Indonesia sudah tidak memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman. Baik dari segi metode pengajaran yang tidak sesuai, terlebih sistem pendidikannya dinilai perlu perombakan mendasar.³⁷

Perkembangan amal usaha Muhammadiyah yang pertama dilakukan adalah mendirikan sekolah dan menyelenggarakan pengajian. Usaha tersebut menunjukkan bahwa pembentukan pimpinan yang pertama terbentuk sebagai pengembangan organisasi adalah bagian pendidikan atau sekolah.

Dengan didirikannya sekolah yang tidak lagi misahkan antara pelajaran yang dianggap agama dan pelajaran yang digolongkan ilmu umum, pada hakekatnya merupakan usaha yang sangat penting dan besar. Karena dengan sistem tersebut bangsa Indonesia dididik menjadi bangsa yang utuh kepribadiannya. Sebab, tidak mungkin untuk menghapus bagian dari sistem sekolah umum atau sistem pesantren.

Untuk menempuh usaha perpaduan antara kebudayaan tersebut dengan jalan mendirikan sekolah umum dengan memasukkan ilmu keagamaan. Mendirikan madrasah yang diberi pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan umum. Dengan usaha perpaduan tersebut tidak ada lagi perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya adalah perintah dan dalam naungan agama.

Usaha yang mula-mula ditekankan pada bidang pendidikan, dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah. Selanjutnya menekankan pada pemurnian tauhid dan ibadah dalam Islam. Misalnya, meniadakan kebiasaan tujuh bulanan (tingkep, Jawa) atau selamatan bagi orang yang sedang hamil dalam usia tujuh bulan. Menghilangkan tradisi keagamaan yang tumbuh dari kepercayaan Islam sendiri, seperti selamatan untuk menghormati Syekh

³⁷ Drs. H. Mustafa Kamal Pasha, (ed.), *op. cit.*, hlm. 89.

Abdul Qadir Jaelani dan lain sebagainya. Bacaan surat *Yasin* dan macam-macam dzikir yang hanya khusus dibaca pada malam Jum'at.³⁸

Masih banyak lagi usaha-usaha dibidang keagamaan, pendidikan kemasyarakatan dan politik yang telah dan sedang dilaksanakan Muhammadiyah Sudah menjadi ciri dalam Muhammadiyah adanya semboyan sedikit bicara banyak bekerja. Oleh karena ini tidak mengherankan bila Muhammadiyah yang hanya memiliki jumlah anggota yang tidak begitu banyak, tetapi cukup banyak dan luas amal usaha serta hasil-hasilnya.

3. Bidang Kemasyarakatan

Muhammadiyah adalah suatu gerakan Islam yang mempunyai tugas dakwah Islamiyah dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam kemasyarakatan.³⁹ Dengan sendirinya banyak usaha ditempatkan dalam bidang kemasyarakatan. Dijelaskan Mustafa Kamal, peran organisasi MD di bidang kemasyarakatan ini diantaranya berupa mendirikan rumah sakit modern lengkap dengan segala peralatan, membangun balai pengobatan, rumah bersalin, apotik dan sebagainya.

Selain ini, MD mendirikan panti asuhan anak yatim, mendirikan perusahaan percetakan, penerbitan dan toko buku yang banyak mempublisir majalah, surat kabar dan yang lainnya. Untuk membantu meringankan beban orang jompo MD memberi dana bantuan hari tua. Tidak terlupakan memberikan bimbingan dan penyuluhan keluarga mengenai hidup sepanjang tuntutan Illahi.

4. Bidang Politik Kenegaraan

Muhammadiyah bukan suatu organisasi politik dan tidak akan menjadi partal politik. Meski demikian, dengan keyakinan bahwa Islam adalah

³⁸ Drs. Muslafa Kamal (ed.), Drs. Chusnan Yusuf, Drs A. Rasyid Sholeh, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam, Untuk SLTP*, Jogjakarta, Persatuan, 1994, hlm. 31 -32.

³⁹ Lihat : Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 1.

agama yang mengatur segenap kehidupan manusia di dunia ini, maka dengan sendirinya segala hal yang berhubungan dengan dunia juga menjadi bidang garapannya, tidak terkecuali soal politik kenegaraan.

Akan tetapi, keikutsertaan Muhammadiyah dalam urusan kenegaram dan pemerintahan dalam batas sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sama sekali tidak bermaksud menjadi sebuah partai politik.⁴⁰ Contoh amal usaha dibidang kenegaram misanya, ikut memelopori berdirinya Partai Islam Indonesia. Begitu pula pada tahun 1945, menjadi pendukung utama berdirinya Partai Masyumi. Pada waktu itu gedung madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, Jogjakarta sebagai tempat kelahirannya.

MD telah ikut aktif dalam keanggotaan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) dan menyokong sepenuhnya tuntutan gabungan politik Indonesia agar Indonesia mempunyai parlemen di zaman penjajahan. Dan, sebagai bukti menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia di kalangan umat Islam, MD mempunyai cara menggunakan bahasa Indonesia dalam tabligh - tablighnya, khutbah ataupun tulisan-tulisannya.

Apa yang telah dikemukakan di atas adalah gambaran singkat dari seluruh amal usaha Muhammadiyah selama ini. Sudah tentu hal ini akan terus berjalan sebagai mana firman Allah, "Beramal lah kamu semua, niscaya Allah, Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan menjadi saksi".

II. Faktor Konflik NU-Muhammadiyah

Telah dikemukakan di muka, bahwa pendirian tentang interaksi NU-Muhammadiyah dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan konflik maupun disintegrasi. Sehingga dapat dikemukakan bagaimana cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Sebelum faktor-

⁴⁰ Drs. H. Musthafa Kama, *op. cit.*, hlm. 91.

faktor penyebab konflik disimpulkan, penulis mencoba merujuk teori konflik agar tidak akan terjadi distorsi pemahaman tentang konflik yang dimaksud.

Dr. Soerjono Soekanto mendefinisikan, konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.⁴¹ Secara umum, konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kekalahan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan.

Dalam konflik, orientasi ke arah pihak lawan lebih penting dari pada obyek yang hendak dicapai. Kenyataan ini disebabkan berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam. Akibatnya, pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.

Bagi Syamsudduha, konflik dinilai sebagai gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Dapat dikatakan tidak ada masyarakat yang tidak mengalami konflik sosial dalam proses perkembangannya. Karenanya, jelas bahwa konflik yang dimaksudkan di sini adalah konflik yang bermakna sosial bukan individual. Akan tetapi yang patut kita perhatikan adalah pertentangan antara golongan sosial yang masing-masing memantapkan identitas golongannya untuk menghadapi golongan lain.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menerjemahkan konflik sosial adalah kegiatan dari suatu kelompok yang menghalangi atau menghancurkan kelompok lain. Walaupun hal ini tidak menjadi tujuan utama aktifitas kelompok tertentu. Konflik sosial dapat menjadi persoalan baru jika mengancam dan menyebabkan rusaknya sistem sosial yang ada.

Namun demikian, tidak selamanya konflik sosial mempunyai potensi yang menyebabkan rusaknya sistem sosial yang ada. Sebab, seperti yang dikemukakan

⁴¹ Prof. DL Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi Edisi Baru*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993. hlm. 99.

Lweis Coser justru membantu mewujudkan integrasi sosial. Konflik tidak selamanya bersifat negatif, melainkan juga dapat bersifat positif dalam hal membantu mewujudkan rasa persatuan dan kesadaran akan hidup bermasyarakat.⁴²

Dalam konteks keagamaan, konflik berawal dari keanekaragaman paham dan keanekaragaman pemahaman ajaran agama. Sehingga, perbedaan tersebut dalam interaksi sosial masyarakat dapat melahirkan berbagai paham atau aliran keagamaan. Kemudian dijadikan sebagai klaim kebenaran.⁴³ Klaim - klaim kebenaran tersebut pada umumnya didasarkan atas keyakinan membabi buta terhadap hasil interpretasi atas teks ajaran agama.

Loyalitas masing-masing pemeluk menempatkan kedudukan agamanya sebagai yang paling benar merupakan hal yang biasa. Namun, upaya yang demikian itu bukan berarti masing-masing bebas menebar wacana yang menyinggung atau memusuhi golongan yang lain. Mengerasnya klaim kebenaran umumnya bermula dari sikap yang berpegang kuat terhadap suatu hasil interpretasi tertentu. Padahal, kemampuan akal dalam melakukan interpretasi terhadap sebuah teks selalu mengalami banyak kelemahan. Selain ini, karena kepentingan tertentu produk interpretasi ini seringkali juga mengalami banyak distorsi.

Karena itu, sikap fanatik terhadap hasil interpretasi teks sumber ajaran agama perlu dikoreksi kembali. Kecenderungan menilai bahwa hanya golongannya saja yang paling benar juga perlu ditinjau kembali. Sebab, idealnya setiap hasil interpretasi harus terbuka untuk diuji atau diluruskan oleh satu atau lebih interpretasi lain. Jadi, kedudukan semua tafsir atas teks dalam bentuk apapun harus dipahami hanya memiliki kebenaran yang tidak mutlak.

Faktor agama akan menjadi sumber intoleransi jika terjadi pemihakan atas

⁴² Syamsudhuha, *op.cit.*, hlm. 8 – 9.

⁴³ Ma'arif Jamuin, *Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*, Jakarta, Cisore Kerja Sama dengan The Asia Foundation, 1987, hlm. 1.

kelompok tertentu. Orang lain yang tidak sepaham dengan dia dianggap salah, berdosa bahkan tidak jarang dikafirkan. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dianggapnya sebagai sesuatu yang paling benar adalah benar menurut cara pandang mereka sendiri yang sifatnya relatif.⁴⁴

Kasus-kasus intoleransi agama, khususnya agama Islam di Indonesia, pada mulanya disebabkan oleh faktor internal yang bersifat *furu'iyah* (cabang) dalam agama. Terlebih yang dialami antara Nu-Muhammadiyah, yang berakibat pada perpecahan. Mengapa terjadi demikian? Banyak diantara kita yang tidak mampu atau tidak mau menjawab pertanyaan ini. Sebagai kompensasinya lalu berseru bahwa antara NU-Muhammadiyah tak perlu disatukan karena keduanya memang berbeda. Namun, ajaran yang menunjukkan bahwa perbedaan adalah rahmat diabaikan begita saja.

Secara garis besar perbedaan serta penyebab konflik penganut faham NU-Muhammadiyah oleh Abdul Rohim Ghazali terdapat dua faktor. Pertama disebabkan oleh gesekan kultural. Persoalan kultural ini dijelaskan ada dua akar persoalan yang terkait. Yakni, karena Muhammadiyah lahir dengan membawa semangat *Tajdid* (pembaruan) yang bercorak purifikasi (membersihkan ajaran Islam dari unsur budaya lokal), yang dianggapnya sebagai takhayul bid'ah dan churafat (TBC). Gagasan *tajdid* Muhammadiyah dengan cara menggusur TBC ini bisa dipahami karena KH Ahmad Dahlan, pendiri organisasi ini, menurut sejarwan Kuntowijoyo hidup dalam masyarakat yang bercorak keagamaan ganda sinkretik dan tradisional.⁴⁵

KH Ahmad Dahlan waktu itu tinggal di kampung Kauman, di tengah – tengah dua lingkungan di satu pihak menghadapi umat Islam sintetik yang diwakili kebudayaan Jawa dengan keraton dan golongan kiai sebagai pendukungnya.

⁴⁴ Drs. H.A. Syafi'i Mufid, M.A. Drs. Munawar Fuad, Noeh (ed), *Beragama di Abad Dua Satu*, Zikru Al Hakim, Jakarta, Kelompok Ghalia Indonesia, 1997, hlm. 88.

⁴⁵ Abd. Rohim Ghazali (ed) *Dua Yang Satu Muhammadiyah Dalam Sorotan Cendekiawan NU*. Bandung Mizan Pustaka, 2000, hlm. 9.

Di pihak lain menghadapi Islam tradisional yang tersebar di daerah pedesam dengan kiai dan pesantren-psantrennya. Mengapa TBC ini harus dibrantas karena beban kultural dianggap dapat menghambat kemajuan umat Islam.

Kepercayaan terhadap klenik dan aji-aji dinilai dapat menyebabkan seseorang menafikan rasionalitas dan mengabaikan ilmu pengetahuan. Dengan gerakan purifikasi Muhammadiyah berhasil menggalakkan pendidikan modern, dan terbukti mampu melakukan transformasi sosial. Muhammadiyah berusaha membersihkan Islam sinkretik dan Islam tradisional sekaligus dengan menawarkan sikap keagamaan yang lebih puritan.

Di sinilah gesekan (seakan ketegangan kultural) antara Muhammadiyah dan NU tidak dapat dihindarkan. Karena kalangan Nahdliyin berusaha mempertahankan unsur-unsur budaya lokal yang dianggap memperkaya aplikasi ajaran Islam. Mereka menyelenggarakan tahlilan dalam rangka memperingati bilangan-bilangan tertentu dari hari kematian seseorang (*khaul* atau *kenduri*) dan berzanji yang kesemuanya ini dianggap bid'ah oleh kalangan Muhammadiyah. Dalam konteks ini, sebagian orang berpendapat bahwa kelahiran NU (1926), baik secara langsung atau tidak langsung merupakan respon (antitesis) dari gerakan Muhammadiyah yang sudah lahir sebelumnya.

Faktor konflik lain dipicu oleh gesekan struktural. Menurut Clifford Geertz, gerakan struktural merupakan lanjutan dari gerakan kultural NU yang berubah menjadi gerakan struktural, ketika menjelma menjadi partai politik. Demikian juga dengan Muhammadiyah, pada mulanya berorientasi gerakan kultural berangsur menjadi gerakan struktural ketika bergabung dengan Masyumi. Meskipun status Muhammadiyah hanya anggota istimewa bisa, dipastikan semua anggota Muhammadiyah lebih memilih Masyumi ketimbang NU.⁴⁶

Disinilah persoalan semakin runcing karena gesekan kultural yang diakibatkan perbedam pemahaman dan aplikasi keagamaan belum tuntas,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

sementara muncul gesekan struktural yang diakibatkan oleh perbedaan aspirasi dan artikulasi politik. Perbedaan antara NU-Muhammadiyah bukan sekadar dalam mengemas ibadah. Melainkan juga dalam nomor atau tanda gambar yang dicoblos dalam pemilu.

Gesekan spiritual NU-Muhammadiyah ini lalu diperparah oleh pihak ketiga, yakni pemerintah baik rezim Soekarno maupun Soeharto yang mencoba mengakomodasi kalangan Islam yang lebih dekat dengan Muhammadiyah dari pada NU. Sampai di sini ketegangan antara Muhammadiyah-NU menjadi sempurna secara kultural, struktural sekaligus konflik yang berlatar teologis, kultural dan politik.

C. Implikasi Konflik NU-Muhammadiyah

Konflik NU-Muhammadiyah terkait persoalan *furū'iyah* sampai saat ini tidak setajam ketika Muhammadiyah memproklamirkan diri sebagai organisasi pemurni ajaran Islam. Namun demikian, faksi-faksi tersebut tetap saja ada dalam setiap sanubari penganut organisasi itu. Kenyataan ini jelas sangat merugikan persatuan umat Islam. Saling tuduh keduanya menjadikan hubungan pengikut organisasi menjadi tidak harmonis. Apa lagi jika para pengikut tersebut mempunyai fanatisme organisasi yang sangat tinggi.

Rumusan hukum yang dilontarkan Muhammadiyah~~X~~ bahwa masalah khilafiyah merupakan perbuatan bid'ah, secara tidak langsung melukai perasaan warga NU. Sehingga masalah *furū'iyah* (seperti tahlil, selamatan, ushali dll) menjadi isu perbedaan faham antar keduanya. Meski demikian, ketegangan-ketegangan yang muncul memang tidak dapat digeneralisasikan pada daerah-daerah tertentu saja. Misalnya, karena persoalan *furū'iyah* seperti tahlil, ushali, selamatan, yang bukan persoalan prinsip.⁴⁷

⁴⁷ Zainuddin Fananie, Atiqa Sabardila, *Sumber Konflik Masyarakat Muslim, Muhammadiyah-NU, Perspektif Keberterimaan Tahlil*, Surakarta, Muhammadiyah University Press dan The Asia Foundation, 2000, hlm.3.

Fenomena tersebut memberi dampak yang sangat merugikan ukhuwah Islamiyah di kalangan internal umat Islam. Sebab, terdapat indikasi munculnya kenyataan bahwa banyak warga NU lebih senang menyekolahkan anaknya ke lembaga Kristen dibanding ke Muhammadiyah. Pada umumnya warga NU enggan untuk berpartisipasi karena bermuara dari persoalan *furu'iyah*. Perbedaan pandangan tersebut jelas telah membawa dampak buruk bagi aktifitas keagamaan, sosio kultural, dan politik umat Islam.

Di bidang aktifitas keagamaan seperti pengajian, tadarus, penyelenggaraan shalat Idul Fitri dan Idul Adha hampir tidak pernah ditemui kerja sama secara organisatoris. Seandainya terjadi kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini umumnya bersifat individual. Begitu pula dalam sosial muncul keengganan kerja sama anggota kedua organisasi dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Seperti pelatihan ketrampilan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat maupun pengabdian masyarakat.

Masing-masing organisasi cenderung memilih melakukan aktifitas sesuai formatnya sendiri. Kenyataan ini juga merembet kepada persoalan politik. Dalam era reformasi ini jelas terlihat bahwa massa Muhammadiyah lebih banyak berafiliasi ke PAN (Partai Amanat Nasional) sedangkan massa NU memilih ke PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PKU (Partai Kedaulatan Umat) atau PNU (Partai Nabdhlatul Umat). Meskipun secara historis NU-Muhammadiyah pernah berafiliasi memilih partai PPP.⁴⁸

Persoalan *furu'iyah* ternyata tidak hanya berkaitan dengan persoalan teologis, tetapi juga tradisi sosio kultural dan visi politis. Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, perlu digali berbagai kemungkinan paradigma baru hubungan yang lebih harmonis. Perbedaan tradisi kiranya tidak perlu disatukan tanpa mengurangi persatuan umat.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

BAB III

PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Sebagaimana Lodge mengatakan bahwa pendidikan itu menyangkut seluruh pengalaman hidup manusia.¹ Dalam pengertian ini, pendidikan diartikan secara luas. Seluruh dialektika individu baik yang berkaitan dengan alam dan sosial merupakan wilayah pendidikan.

Dalam pribahasa dikenal istilah "pengalaman adalah guru yang terbaik". Guru difahami tidak hanya sebatas manusia yang memberikan pengetahuan lewat proses belajar mengajar di kelas. Akan tetapi guru adalah apa saja yang dapat mengarah terhadap pencapaian pengetahuan.

Muhammad yang diyakini sebagai Nabi umat Islam misalnya, pernah berguru kepada Jibril (mahluk *ghaib*). Begitu juga Ibrahim sang pembawa agama Tauhid yang *hanif* Untuk menemukan sebuah nilai kebenaran, harus melewati proses panjang. Ibrahim berguru kepada matahari, bintang, bulan dan lain-lain yang pada awalnya dikira sebagai "tuhan" yang menciptakan alam raya.

Hanya saja persoalannya, ketika pengertian pendidikan dipahami secara luas maka mengalami kesulitan dalam dataran operasionalnya. Oleh karena itu diperlukan batasan tertentu untuk mempersempit dan mempertegas pengertian pendidikan. Walaupun harus diakui bahwa upaya mempersempit ini terkadang mereduksi makna pendidikan. Akan tetapi dalam dataran yang lebih praktis relatif diperlukan untuk memberi definisi pendidikan secara spesifik.

Marimba dalam hal pengertian pendidikan termasuk kelompok yang cenderung mengartikan pendidikan secara sempit. Pendidikan diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.²

¹ Lihat dalam, Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 25.

² Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, PT. Alma'arif, 1981, hlm 23.

Secara eksplisit, Marimba mencoba untuk mengidentifikasi proses belajar mengajar yang di dalamnya terdapat unsur guru dan murid. Guru secara aktif memberikan materi pengajaran, dan murid sebagai obyek yang selalu menerima.

Demikian pula Achmadi, mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar dari orang dewasa kepada anak sebagai upaya untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia.³

Pengertian pendidikan secara sempit tersebut lebih difokuskan pada upaya seorang guru terhadap muridnya. Bagaimana guru memberikan materi - materi tertentu terhadap murid sebagai proses pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan sudah dipersiapkan dan dikemas sedemikian rupa dengan muatan - muatan yang dipandang strategis. Proses rekayasa inherek atas praktek dalam pendidikan, dengan merancang *input, proses dan output-nya*.⁴

Dalam Bab III ini (Perspektif pendidikan Islam), penulis akan mengacu pengertian pendidikan dalam artian sempit sebagaimana Marimba dan Achmadi telah mendefinisikannya. Dengan menyadari segala kelemahan yang ada pada definisi sempit ini yang cenderung mereduksi makna pendidikan), relatif dapat mempertegas wilayah pengkajian.

Seringkali oleh para tokoh pendidikan, prosesi pendidikan secara sempit tersebut diidentifikasi kedalam tiga kelompok. Yakni, pendidikan formal (sekolah), pendidikan non-formal (keluarga) dan pendidikan in-formal (masyarakat).⁵ Ketiga elemen inilah yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan.

Selanjutnya, kajian pendidikan dalam penelitian ini dibatasi pada pendidikan Formal (sekolah). Terlebih, pendidikan formal yang dimiliki oleh organisasi NU-Muhammadiyah. Sebab, institusi pendidikan dalam dataran praktis sangat bersentuhan dengan kebijakan masing-masing institusi keagamaan tersebut. Pada

³ Ahmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, Aditya Media, 1992, hlm. 16.

⁴ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm. 70.

⁵ Ahmad Tafsir, *Epistemologi Untuk Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung, IAIN Sunan Gunung Jati, 1995, hlm. 7.

akhirnya, akan berpengaruh terhadap pembangunan sikap anak didik dalam mensikapi perbedaan keduanya.

Batasan pendidikan formal tersebut dilihat dari kacamata Islam yang sering kita kenal dengan istilah pendidikan Islam. Supaya tidak mengalami keterputusan kontekstual, maka penulis meminjam konsep iman, ilmu dan amal sebagai *frame* penelitian pendidikan Islam yang berorientasi pada realitas ke Indonesiaan.⁶

A. Konsepsi Umum

Satu hal yang cukup fundamental dalam mengawali pembahasan pendidikan Islam, mencoba untuk menjawab persoalan benarkan ada apa yang disebut dengan pendidikan Islam. Kesadaran ini muncul setidaknya untuk dijadikan sebagai landasan pengkajian dan pengujian sintesis dari keberadaan pendidikan Islam.

Secara umum, konsep pendidikan terdapat cukup varian yang seringkali mengalami tumpang tindih (*over lapping*). Sebagaimana pendidikan dalam arti sempit formal, orang sering mengenal dengan istilah sekolah. Sekolah berasal dari bahasa Latin yang mempunyai akar kata *skhole, scola, scolae*.

Kata *skhole, scola, scolae* secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang.⁷ Akan tetapi, dalam perkembangannya sekolah berubah menjadi sebuah institusi yang mengikat. Sehingga, meminjam istilah Roem Topatimasang, sekolah dikatakan sebagai “candu”.

Sejalan dengan itu, tidak berlebihan kiranya jika Margared Mead dalam catatan kecilnya menunjukkan sikap pemberontakan terhadap aktifitas sekolah. Misalnya dalam catatan kecilnya yang berbunyi, “...*Nenek ingin aku memperoleh pendidikan, karenanya ia melarangku sekolah...*”.

⁶ Dalam hal ini lihat; Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta, Paramadina, 1995, hlm. III.

⁷ Roem Topatimasang, *Sekolah Itu Candu*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, hlm 5.

Pemberontakan terhadap aktifitas sekolah juga dilakukan Paulo Feire dan Ivan Illich. Pada dasarnya, keduanya menilai bahwa sekolah merupakan bentuk propaganda politik penguasa untuk mendukung dan melanggengkan kekuasaan.

Meski ada pula kelompok yang mencoba mempertahankan eksistensi sekolah. Sebab, sekolah merupakan wahana menuju pencapaian tujuan pendidikan. Ditengah polemik semacam ini, lalu dimana letak pendidikan Islam. Apakah pendidikan Islam formal yang diselenggarakan lembaga keagamaan NU-Muhammadiyah juga untuk mendukung kekuasaan tertentu.

Secara normatif, Islam merupakan agama wahyu -berasal dari Tuhan - yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw. untuk seluruh alam. Ajaran pokok Islam adalah Tauhid (*monoteisme*).

Sebagaimana terkandung dalam kata Islam ini sendiri berarti tunduk, pasrah.⁸ Seluruh mahluk -*cosmos* (alam) dan *micro cosmos* (manusia)- harus tunduk terhadap Tuhan Yang Esa. Secara umum ketertundukan alam ini sudah diatur oleh Tuhan melalui hukum alam (*sunatullah*). Sementara ketertundukan manusia kepada Tuhan (kebenaran) sudah menjadi fitrah manusia yang bersifat *hanif*.⁹

Sikap pemberhalaan adalah pengingkaran terhadap ke-Esa-an Tuhan atau disebut kafir. Sehingga tugas dari agama ini sendiri pada dasarnya adalah untuk memerangi "agama"^{nt} yang memberhalakan tuhan-tuhan kecil selain Tuhan Yang Esa.¹⁰ Dalam realitas sosial, Ali Syariati menengarai adanya berhala nafsu, berhala materi, berhala politik-kekuasaan dan berhala lainnya.

Di sinilah seharusnya agama berperan sebagai ajaran yang menghapus berhala-berhala ciptaan manusia sendiri yang menyesatkan. Manusia tidak boleh tunduk dan pasrah kepada sesama manusia. Sebab, Tuhan menciptakan manusia

⁸ Nurcholish Madjid, *Ibid*, hlm. 2.

⁹ Qs. Arrum: 30.

"Hadapkinlah dengan seluruh dirimu itu kepada agama (Islam) sebagaimana engkau adalah *hanif* (secara kodrat melihat kebenaran, itulah fitrah Tuhan yang telah memfitrahkan manusia padanya)".

secara sejajar (*egaliter*). Dalam ajaran Islam, sebagai pembeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah tingkat ketaqwaan."¹¹

Persoalan selanjutnya, dimana letak pendidikan Islam. Mengingat garis besar ajaran Islam merupakan sebuah ajaran nilai di seputar lingkaran ke-Tuhanan, alam semesta dan manusia. Tiga persoalan yang sangat kohesif antara satu dengan yang lain tersebut merupakan inti ajaran Islam. Meski dapat pula dikatakan bahwa inti dari inti tersebut adalah dari yang satu sebagai sumber segala sesuatu yang ada (Tuhan). Tuhan adalah yang awal dan sekaligus merupakan yang akhir.

Dalam mensikapi persoalan pendidikan Islam di atas, Abdurrahman Shaleh, memberikan argumen tentang keberadaan pendidikan Islam. Dikatakannya bahwa, *pertama* pendidikan terdapat dalam pesan-pesan ajaran Islam. Dalam ayat Alqur'an dapat ditemukan adanya ungkapan *tarbiyyah* (pendidikan). Istilah lain dari *tarbiyyah* adalah *rabb* yang menurut para ahli leksikografi bahasa Arab diturunkan dari akar kata yang sama dengan akar kata *tarbiyyah*. *Kedua*, Nabi Muhammad sendiri mengidentifikasikan dirinya sebagai *mu'alim* (pendidik). Nabi selalu memberi pengajaran kepada manusia tentang prinsip-prinsip Islam dan memerintahkan kepada mereka yang telah menerima pengajarannya untuk mengajarkan kepada orang lain.¹²

Argumen yang disampaikan oleh Abdurrahman Shaleh tersebut, kelihatan sangat sederhana dan terkesan legitimatif. Ia hanya mengambil pengertian-pengertian dari Alquran dan Hadits yang cenderung bersifat normatif. Secara

¹⁰ Ali Syari'ati, *Agama versus "agama"*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1994, hlm. 7.

¹¹ "Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah : 82), "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri". (An-Nisa': 36), "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu". (Qs. Al-Hujurat : 13).

¹² Abdurrahman Shalih Abdullah, *Landasan dan Tujuan Pendidikan Menurut Alquran Serta Implementasinya*, Bandung, CV. Diponegoro, 1991, hlm. 42-43.

kontektual dapat dipahami bahwa diskripsi mengenai pendidikan Islam tersebut tampak merupakan persoalan sederhana (prilaku hidup sehari-hari yang bersifat alamiah) pada zaman Nabi yang bisa dikategorikan kedalam paradigma pendidikan secara umum.

Sementara perkembangan pendidikan kontemporer bergerak dinamis seiring dengan perkembangan budaya dan peradaban manusia. Oleh karena itu sangat wajar ketika legitimasi tentang pendidikan Islam tersebut masih dipertanyakan. Lebih-lebih yang berkaitan dengan pendidikan formal yang saat ini diterapkan pada hampir seluruh belahan dunia. Bahkan umat Islam kontemporer, rata-rata cenderung berharap banyak terhadap sistem pendidikan formal ini.

Zakiah Darajat, dalam hal pendidikan Islam mengakui bahwa pengertian pendidikan seperti yang lazim dipahami sekarang belum terdapat di zaman Nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan Nabi dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih ketrampilan, berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim ini telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang.¹³

Dalam pengertian tersebut persoalan pendidikan Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi, lebih merupakan persoalan budaya yang ada unsur kesamaanya dengan diskripsi yang disampaikan Abdurrahman Shaleh. Akan tetapi ketika persoalan budaya tersebut diberi label Islam maka perpaduan dengan dimensi teologis menjadi kohesif. Maka secara implisit definisi tersebut justru memberikan gambaran hubungan yang harmonis antara persoalan agama dengan budaya secara umum dalam Islam. Sementara sistem pendidikan formal sebagaimana yang ada pada saat ini belum ada pada zaman Nabi.

Adalah Kuntowijoyo dalam hal ini menjelaskan, dengan memberi titik

¹³ Zakiah Darajat dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, hlm. 26.

singgung antara pendidikan dengan Islam. Disebutkan bahwa rekayasa menyusun konsep pendidikan Islam (yang di dalamnya termasuk ilmu, filsafat dan sistem pendidikan Islam) merupakan salah satu konsekuensi muslim atas imannya kepada Allah sebagai realitas subyektif untuk diaktualisasikan menjadi realitas simbolik yang wujudnya adalah penciptaan konsep seni, budaya, filsafat dan ilmu.¹⁴

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tidak ada dualisme atau pemisahan antara agama (Islam) pada satu sisi dan pendidikan dalam bentuk apapun pada sisi lain. Meminjam istilah Amin Abdullah, Islam yang normatif perlu diterjemahkan secara *real* ke dalam format budaya dan peradaban manusia sehingga mensejarah. Pendidikan merupakan instrumen dari proses pensejaraan tersebut.

Normativitas dan historisitas agama dianalogkan sebagaimana dua sisi mata uang logam yang keduanya bisa dibedakan akan tetapi tidak bisa dipisahkan.¹⁵ Sehingga persoalan mengenai ada tidaknya pendidikan Islam secara kausalistik sudah menjadi konsekuensi logis dari internalisasi iman. Persoalan sistem formal atau non formal dan lain sebagainya, itu lebih pada persoalan daya kreatifitas pemeluk agama, dan ini lebih cenderung dijadikan sebagai alat menuju pada sebuah tujuan yang ingin dicapai.

1. Definisi

Pendidikan Islam ialah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.¹⁶ Pendidikan Islam dapat pula dimaksudkan segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia dan sumberdaya insani menuju

¹⁴ Kuntowijoyo, *Menelan Cakrawala*, Yogyakarta, Salahudin Press, 1981, hlm. 22.

¹⁵ Amin Abdullah, *Studi Agama; Noematifitas atau Historisitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hlm. Vii.

¹⁶ Achmad D Marimba, *loc. cit.*

terbentuknya insan kamil yang sesuai dengan norma Islam.¹⁷

Atau juga dapat diartikan melatih perasaan murid-murid dengan cara sebegitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan dipengaruhi sekali oleh nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam.¹⁸

Sementara Muhammad SA. Ibrahimi mendefinisikan pengertian pendidikan Islam, yakni, *Islamic education in true sense of the learn, is a system of education which enables a man to lead his life according to the Islamic ideology, so that he may easily mould his life in accordance with tenets of Islam....*¹⁹

Masih banyak lagi para tokoh atau pemerhati pendidikan Islam memberikan definisi tentang pendidikan Islam. Mengingat setiap definisi yang didiskripsikan serumpun, meskipun sepintas terdapat varian di dalamnya. Karenanya, penulis hanya mengambil beberapa definisi saja sebagai *sample* yang menunjukkan representasi dari definisi – definisi secara *general*.

Dari definisi yang telah disebutkan diatas, maka dapat digeneralisasikan bahwa pendidikan Islam merupakan segala upaya baik yang bersifat bimbingan, latihan ataupun pengembangan potensi kemanusiaan subyek didik secara total yang bersandar pada nilai-nilai transendental (agama Islam). Antara potensi kemanusiaan pada satu sisi, dan nilai-nilai transendental pada sisi lain sangat melekat dalam pendidikan Islam.

Pendidikan Islam menempatkan keberadaan manusia secara total. Baik yang bersifat internal individu kemanusiaan, maupun yang bersifat eksternal individu yang berkaitan dengan sosial, alam dan nilai transendental. Sehingga,

¹⁷ Achmadi, *loc. cit.*

¹⁸ Syed Sajjad Husain, *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*, Bandung, Gemarisalah Press, 1994, hlm. 1.

¹⁹ Lihat ; H. M. Arifin, M.Ed., *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995, hlm. 3.

dalam dataran oprasional proses pendidikan Islam tidak hanya sebatas pada kegiatan pengajaran (*transfer of knowlargo*) yang berorientasi pada pengembangan intelektual (*intelectual mainded*) akan tetapi juga berorientasi pada penanaman nilai-nilai ke-Islaman (*transfer of values*). Hingga menginternal dan terimplementasi dalam prilaku budaya dan peradaban umat.²⁰

2. Karakteristik

Pendidikan dalam Islam melihat subyek didik (manusia) secara utuh atau total akan eksistensinya. Manusia yang terdiri atas berbagai dimensi kemanusiaan dijadikan sebagai fitrahnya.

Sayed Qutub, dalam hal ini mengidentifikasi manusia atas tiga dimensi kemanusiaan yang merupakan satu kesatuan. Ketiga dimensi tersebut antara lain, dimensi jasad, roh dan akal.²¹ Sementara, pendapat lain yang lebih rinci dalam mengidentifikasi dimensi kemanusiaan meliputi, jasad, roh, akal nafs, dan nafsu. Sehingga porspektif Islam terhadap manusia mengandung unsur keseimbangan (*balancing*). Sebab, terdapat unsur yang bersifat material sekaligus imaterial yang terkandung dalam diri manusia.

Dikarenakan keberadaan manusia ini terdiri dari berbagai dimensi yang integral, maka pendidikan Islam berupaya untuk mengakomodir dari berbagai dimensi tersebut. Bimbingan dalam pendidikan diarahkan menuju pada terbentuknya manusia secara utuh atau sempurna yang sering disebut dengan istilah menuju terbentuknya insan kamil. Meninggalkan salah satu dimensi kemanusiaan saja akan berakibat pada pembentukan pribadi yang pecah (*split of personality*).²²

²⁰ Aden Wijdan SZ, *Orientasi dan Cita-Cita Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Aditya Media, 1997, hlm. 9.

²¹ Muhammad Qutub, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung, PT. Al- Ma'arif, 1993, hlm. 35.

²² Muzahofar Akhwan, *Karakteristik, Tujuan dan Sasaran Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Aditya Media, 1997, hlm. 36.

Sebagaimana orang-orang yang berpaham empirisme-materialisme, tidak mengakui dimensi-dimensi diluar material yang tidak tampak secara kasat mata. Akibatnya pada akhir abad ke-XX mereka mengalami keterasingan diri (teralienasi).²³ Setelah mereka memperoleh tujuan hidupnya yang bersifat material, ternyata banyak diantara mereka merasa ada sesuatu yang timpang dalam hidup. Dalam kondisi semacam ini, akhirnya tempat porkumpulan yang berbau kultus-kultus menjamur. Di Amerika dapat ditemukan tidak kurang dari 3000-an tempat kultus. Ada pula dari sebagian mereka yang nekat bunuh diri secara masal karena mengalami keterasingan hidup.²⁴

Paham materialisme lahir pada zaman pertengahan yang ditandai oleh *renaissance* (pencerahan). Puncak perkembangannya hingga pertengahan abad ke-XIX. Gambaran tentang zaman pencerahan ini, sebagaimana Aguste Comte, seorang filsuf sosiolog Prancis yang berkeyakinan adanya indikasi kebangunan ilmu (*science*) dan keruntuhan agama (*mistic*). Dalam hal ini disinyalir oleh Comte bahwa agama yang bersifat mistik hanya sebagai penghambat kemajuan peradaban manusia. Lebih tegas lagi Fiedrich Nietzsche, seorang filsuf dan penyair Jerman mengatakan Tuhan telah mati (*God is death*).²⁵

Sedangkan orang-orang mistisisme, menganggap bahwa kehidupan dunia sebatas fatamorgana. Dunia merupakan kepalsuan hidup (*pseudo of life*) semata. Sedangkan esensi kehidupan adalah kesucian jiwa menuju alam keabadian. Sehingga proses keamanusiaan adalah upaya penyucian jiwa itu

²³ Sains yang empirik, sebagaimana produk orang - orang modernisme memang memberikan efesiensi dan fasilitas hidup yang lebih nyaman. Akan tetapi di sisi lain juga memberikan berbagai ekses yang tidak terduga. Selanjutnya baca; Komarudin Hidayat, *Post Modernisme Menolak Tuhan Epistemologis*, Amanah, 27 Mei-9 Juni 1994, hlm. 80.

²⁴ Nurcholish Madjid, *Bahaya Kultus dan Fundamentalisme*, Tekad, No. 14/ Tahun I, 9-15 Agustus 1999.

²⁵ Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Islam dan sekularisme*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1981, hlm. 2-3.

sendiri. Implikasinya adalah kehidupan yang bersifat duniawi menjadi dinafikkan. Kebutuhan-kebutuhan jasmaniah manusia tidak diperhatikan dan cenderung teraniaya oleh dirinya sendiri.

Perbedaan prinsip tentang eksistensi manusia tersebut menjadi karakter dari masing-masing model pemahaman. Karakteristik dari paham materialisme melihat manusia dalam perspektif jasadnya saja. Dimensi di luar jasad yang tidak empirik dianggap *nonsen*. Sementara, karakteristik dari paham mistisisme melihat manusia dalam perspektif jiwa (*shoul*) *ansich* yang bersifat imaterial sebagai esensi kemanusiaan.

Islam dalam hal ini mempunyai karakteristik spesifik, yang memandang manusia secara komprehensif Kedua dimensi kemanusiaan baik yang material maupun yang imaterial (spiritual) merupakan satu kesatuan yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan fitrah kemanusiaan.²⁶ Begitu pula dalam Islam diyakini, bahwa dimensi imateri (spiritual) yang tidak empirik bukan berarti menghambat kemajuan peradaban manusia.²⁷ Sementara dimensi materi (jasad) dalam diri manusia yang harus ditumbuh kembangkan bukan berarti mereduksi dimensi spiritual yang sudah merupakan fitrah manusia.

Karakteristik konsepsi tentang manusia dalam pandangan Islam tersebut, menjadi pijakan karakteristik pendidikan Islam. Berlian Somat mengidentifikasi karakteristik pendidikan Islam sebagai upaya membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah. Sedangkan isi pendidikannya adalah ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap dalam Al-qur'an dan perilaku Nabi.²⁸

²⁶ Achmadi, *op. cit.*, hlm. 21

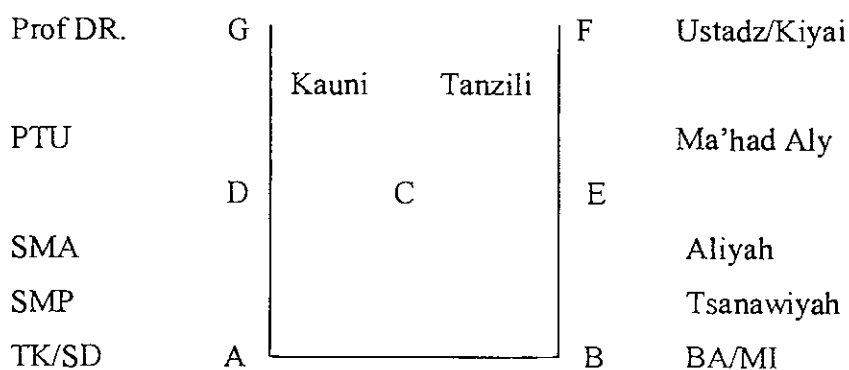
²⁷ Muzhofir Akhwan, *op. cit.*, hlm. 39 - 40.

²⁸ Burlian Somad, *Beberapa Persoalan Dalam Pendidikan Islam*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1981, hlm. 21.

Hal senada diungkap M. Arifin. Karakteristik pendidikan Islam adalah membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah anak didik melalui ajaran Islam kearah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan.²⁹

Secara konseptual, karakteristik pendidikan Islam mempunyai nilai lebih ideal dibandingkan dengan yang lain. Hanya saja persoalannya ketika Islam memandang keberadaan manusia secara utuh, dalam dataran aktual seringkali mengalami distorsi. Koherensi dari berbagai dimensi kemanusiaan tersebut menjadi kendala yang serius. Dominasi dari salah satu bagian dimensi kemanusiaan seringkali tidak dapat dihindari.

Dualisme atau dikotomi merupakan istilah yang seringkali menjadi kendala dalam proses pendidikan Islam. Terjadinya dikotomi dalam praktek pendidikan Islam yang hanya mengedepankan salah satu dimensi kemanusiaan ini berakibat pada tereduksinya karakteristik pendidikan Islam. Sebagai upaya untuk menghindari dikotomi tersebut dan menjaga eksistensi karakteristik pendidikan Islam, AM. Syaefudin berupaya untuk mengintegrasikan ilmu dalam pendidikan sebagaimana disajikan dalam gambar ini.³⁰



²⁹ H.M. Arifin, M.Ed., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, hlm.

³⁰ Muzhofar Akhwan, *op. cit.*, hlm. 38.

Keterangan:

ABC: Sebagai basis yang sama antara muatan ilmu agama dan Aliyah sebagai umum pada jenjang SMA atau fardlu'ain.

DCG: Spesialisasi pendidikan umum (*Ilmu kauni*)

CEF: Spesialisasi pendidikan Ma'had My (*Ilmu Tanzili*)

Ilmu Kauni: Ayat-ayat yang tersurat dalam Al-quran dan Hadits

Ilmu tanzili: Ilmu pengetahuan kealaman

Perumusan pendidikan Islam yang didiskripsikan oleh AM. Syaefudin tersebut mencerminkan adanya keseimbangan konsep materi pendidikan Islam. Keseimbangan tersebut merupakan karakteristik pendidikan Islam yang lebih bersifat adil. Dalam bahasa cendekiawan muslim Nurcholish Madjid, adil berarti imbang (*balance* atau *tawazzun*). Pengertian adil yang dimaksudkan bukan berarti sama.³¹ Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa sebagai karakteristik pendidikan Islam mencoba memposisikan manusia sebagai subyek pendidikan secara adil. Berbagai dimensi kemanusiaan yang cukup kompleks tersebut sangat diperhatikan dalam proses pendidikan Islam.

3. Orientasi

Berbagai pertimbangan untuk menjaga eksistensi pendidikan Islam agar tetap *survive* merupakan agenda tersendiri bagi pemerhati perkembangan dan pemikir pendidikan Islam pada khususnya. Lebih-lebih ketika pendidikan Islam dihadapkan pada keterpasungan dan ketidakberdayaan atas dominasi struktur global, yaitu dominasi struktur kapitalisme Barat.

Kenyatam bahwa peradaban dunia bergerak dinamis tidak dapat dipungkiri. Pemikiran cerdas untuk mensikapi perubahan menjadi kebutuhan manusia agar tidak kehilangan relevansi. Perkembangangan ilmu pengetahuan dan tekuologi telah merubah potret dunia sedemikian majunya.

³¹ Dedy Djamaudin Malik, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998, hlm 196.

Hal-hal yang dulu dianggap tidak mungkin, saat ini bisa menjadi sebuah kenyataan. Dunia yang dulu masih bersifat lokal, berubah menjadi global yang ditengarai oleh datangnya era informasi global (*Ciber spiece*). Perubahan ini mempunyai implikasi terhadap pergeseran tatanan sosial dari tingkat sederhana (gaya hidup atau perilaku) sampai tingkat yang paling prinsipil (sistem nilai). Dalam kondisi semacam ini patut dipertanyakan kemana arah orientasi pendidikan Islam.

Ada beberapa paradigma orientasi pendidikan Islam. Menurut Abu Su'ud, dilihat dari segi metodologis setidaknya terdapat tiga orientasi paradigma pendidikan.³² Pertama, pendidikan yang berorientasi pada transmisi budaya atau perpindahan nilai (*transjer of values*). Maksudnya, pendidikan dijadikan sebagai proses pewarisan tradisi, budaya atau keyakinan para pendahulu kepada anak didik sebagai penerus. Proses pewarisan ini bersifat *given* terhadap nilai-nilai yang perlu dijaga atas eksistensinya yang sekaligus merupakan tujuan dari pendidikan. Sebagai konsekuensi dari paradigma pendidikan ini, kreatifitas anak menjadi terbelenggu dan kurang berkembang.

Kedua, pendidikan dipandang sebagai proses transformasi budaya. Nilai-nilai tradisi yang sudah tidak relevan dapat dibongkar dan diganti dengan sistem nilai baru. Proses modernisasi atau pembaruan-pembaruan berjalan terus menerus. Proses pendidikan dengan model ini didasarkan atas sikap keragu-raguan dan ketidakpuasan terhadap warisan tradisi lama yang dinilai membelenggu kemajuan zaman.

Ketiga adalah, paradigma pendidikan yang melihat pendidikan sebagai proses aktualisasi diri. Maksudnya, dalam proses pembelajaran subyek didik dilatih sedemikian rupa untuk selalu siap dan aktif terhadap segala bentuk perubahan yang akan datang. Paradigma pendidikan ini memang kurang

³² Abu Su'ud, *Reformasi Pendidikan Sebuah Keharusan, Disampaikan dalam Seminar Pendidikan, Magelang, 31 Mei 1999.*

memperhatikan persoalan masa lalu. Termasuk persoalan nilai-nilai tradisi atau keyakinan. Namun, subyek didik benar-benar diberi kebebasan untuk menentukan masa depannya.

Ketiga orientasi pendidikan tersebut merupakan model yang sering dipraktekkan dalam dunia pendidikan. Harus diakui bahwa masing-masing paradigma mempunyai kelebihan dan sekaligus kelemahannya sendiri. Pada umumnya suatu paradigma pendidikan diterapkan sesuai dengan taraf kebutuhan masyarakat. Semisal masyarakat Islam, paradigma yang paling menonjol berorientasi pada model pertama. Yakni sebagai proses transmisi nilai dan budaya. Meski demikian tidak menutup kemungkinan untuk berupaya mengintegalkan antara paradigma pertama, kedua dan ketiga.

Pada sisi lain, jika dikaji dari segi orientasi strategis setidaknya ada dua pendekatan. Pertama pendekatan struktural, dalam artian bagaimana konsepsi pendidikan Islam dapat diterapkan atau setidaknya mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga dijadikan sebagai sistem negara (*state*). Hal ini sejalan dengan Jusuf Amir Feisal yang menuliskan bahwa Islam telah menyumbang pembinaan pendidikan nasional.³³ Umpamanya konsep Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama dari Pancasila) inhern dengan konsep Allah yang dianut umat Islam.³⁴ Implikasi dari konsep Tauhid ini menjadi tujuan pendidikan nasional yang berkarakteristik pada sandaran teologis.³⁵ Selanjutnya Feisal menegaskan bahwa;

"...Dari hubungan-hubungan tersebut akan tampak jelas bahwa konsep manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merujuk pada konsep tersebut. Setiap warga negara yang beragama Islam memiliki kemerdekaan hak untuk melakukan dan melaksanakan ajarannya sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu sesuai dengan pengertian sistem tersebut yaitu merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai

³³ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm. 72.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Lihat ; UU RI Nomor 2 Tahun 1989, *Sistem Pendidikan Nasional*, Semarang, Aneka ilmu, 1992, hlm. 4.

tujuan nasional. Terkadang makna bahwa agama Islam atau sekurang-kurangnya nilai-nilai agama Islam mesti merupakan suatu keseluruhan dalam sistem pendidikan nasional sehingga nilai-nilai Islam terkandung dalam setiap komponen pendidikan, proses belajar mengajar, dan sistem evaluasi.”³⁶

Lebih luas lagi, ada pula yang menawarkan bahwa pendidikan Islam berorientasi strategis struktural yang bersifat global. Sistem pendidikan Islam dijadikan sebagai kekuatan tandingan sistem pendidikan Barat yang telah tergelincir pada dehumanisasi, animalisasi atau mekanisasi manusia.³⁷ Perspektif ini semata-mata dilihat dan segi filosofisnya. Sehingga pendidikan Islam diharapkan menjadi pendidikan alternatif yang akan membebaskan manusia dari dehumanisasi tersebut.

Upaya orientasi strategis struktural ini dianggap penting, karena dijadikan sebagai wadah yang didalamnya sistem-sistem ajaran atau dimensi lain dari ajaran Islam dapat direalisasikan.³⁸ Atau dengan kata lain, struktur yang menjadi wadah tersebut dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan nilai ajaran Islam.

Kedua adalah orientasi strategis kultural. Model ini mencoba untuk menginternalisasikan ajaran Islam lewat jalur lembaga pendidikan. Djohar mengatakan bahwa internalisasi bukan inovasi, internalisasi pada dasarnya adalah proses budaya yang melibatkan martabat manusia seutuhnya yang mewarnai paradigma wawasan, cara berpikir, sikap, moral dan cara berperilaku seseorang atau masyarakat.³⁹

Dengan demikian maka pendidikan Islam dapat dikembangkan menjadi *agent of technologically and culturally motivating resources*. Nilai-nilai tradisional yang membelenggu dan bersifat dogmatis statis dapat

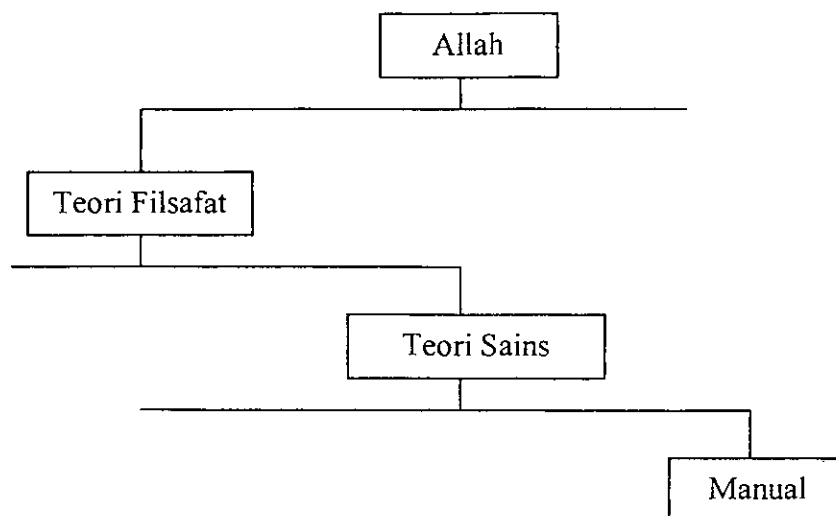
³⁶ Jusuf Amir Feisal, *op. cit.*, hlm. 17.

³⁷ Achmadi, *op. cit.*, hlm. 4.

³⁸ Fachry Ali, *Islam Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural*, Bandung, Mizan, 1985, hlm. 17.

³⁹ Djohar, *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta, IKIP, 1999, hlm.

dibungkar secara dinamis.⁴⁰ Ahmad Tafsir dalam hal ini memberikan konsep dalam bentuk gambar sebagai proses pembudayaan ilmu pendidikan Islam.



Allah merupakan sumber dari pengetahuan yang merupakan kebenaran pertama (QS. Albaqarah : 32) Penafsiran manusia atas kebenaran pertama menjadi teori filsafat. Dan teori filsafat ini akan melahirkan berbagai teori sains Sedangkan dari teori sains akan melahirkan berbagai teknik manual. Jadi kesemuanya itu merupakan rangkaian sistem yang integral, proses pembudayaan manusia bersandar pada nilai-nilai agama.⁴¹

B. Tinjauan Historis

Seringkali orang mengatakan bahwa sejarah adalah kejadian masa lalu. Meskipun begitu sejarah tetap menjadi penting untuk dijadikan sebagai bahan kajian tersendiri, termasuk didalamnya adalah kajian ilmu. Ataupun dapat pula dijadikan sebagai bahan refleksi perjalanan budaya manusia. Seperti bangsa Indonesia dengan Pancasila merupakan internalisasi dari perjalanan panjang

⁴⁰ H.M. Arifin M.Ed., *op cit*, hlm 26.

⁴¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1992, hlm. 17.

sejarah bangsa. Sukarno (Presiden pertama RI.) sering kali mengingatkan agar bangsa Indonesia jangan lupa akan sejarah.

Mempelajari sejarah atau kejadian masa lalu bukan berarti ingin beromantisme belaka. Bukan berarti pula ingin membangun masa lalu untuk kepentingan masa lalu itu. Akan tetapi lebih dari pada itu, sejarah sangat berarti untuk kepentingan saat ini bahkan untuk memprediksikan masa yang akan datang. Sebagaimana Sejarahwan Amerika menganalogkan orang yang belajar sejarah sebagaimana orang naik kereta api menghadap kebelakang. Ia dapat menengok kekiri dan kekanan akan tetapi agak susah untuk menengok kedepan.⁴² Ini artinya bahwa keberadaan sejarah dapat dijadikan sebagai referensi untuk membangun kerangka kebudayaan dan peradaban saat ini.

Lain halnya dengan Syari'ah mengatakan, sepanjang sejarah manusia selalu ada kejadian-kejadian yang mirip dan terulang-ulang. Struktur masyarakat selalu mencerminkan adanya kelompok sosial kelas elit dan kelas pinggiran. Diantara dua kelas kelompok sosial tersebut ada kelompok kelas sosial tersendiri yang sangat terbatas jumlahnya -selanjutnya disebut kelompok kritis- yang selalu protes terhadap tatanan sosial yang timpang dan akhirnya menggeser kelas elit.⁴³ Oleh sebab itu orang selalu menganggap perlu untuk belajar sejarah.

Karena sejarah merupakan ilmu tentang waktu,⁴⁴ maka supaya setiap waktu dapat dipahami, dalam penulisan sejarah pendidikan Islam di Indonesia ini perlu membuat pembabakan waktu atau periodisasi. Biasanya periodisasi tersebut terbagi antara lain, periode masuknya Islam di Indonesia, periode kekuasaan Kerajaan-kerajaan Islam, periode penjajahan Belanda, periode penjajahan Jepang dan periode Kemerdekaan Republik Indonesia.⁴⁵ Sedangkan pengkajian periodisasi tersebut dalam penelitian ini akan dibahas secara *general*.

⁴² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang, 1997, hlm. 17.

⁴³ Ali Syari'ati, *Islam Agama Protes*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1991, hlm. 13.

⁴⁴ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 13.

⁴⁵ Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta, Depag, 1986, hlm.5.

Pendidikan Islam di Indonesia sudah dimulai sejak pertama kali masuknya Islam di Indonesia. Banyak pendapat tentang waktu kapan (*when*) Islam masuk di Indonesia. Sebagian berpendapat bahwa Islam masuk di Indonesia pada pertengahan abad ke- XII M. Pertama kali yang datang adalah mubalig dari Persi (Iran). Alasannya, kerajaan Islam pertama di Indonesia bernama Pase (Pasai) yang mempunyai rumpun bahasa dari kata Persi. Ditambah dengan kenyataan bahwa orang Islam Indonesia sangat hormat kepada keturunan Sayid atau Habib yaitu keturunan Hasan dan Husen putera Ali bin Abi Thalib.⁴⁶

Akan tetapi sebagian yang lain menegaskan bahwa, pendapat diatas sekarang sudah dianggap lemah. Kelemahan pendapat bahwa Islam pertama kali ke Indonesia pada pertengahan abad ke- XII dengan bukti kerajaan Pasei ialah, kata pase (pasei) bukan berasal dari kata persi, tetapi kata pasir Di daerah Pasei tersebut tanahnya bercampur dengan pasir. Orang Aceh menyebut pasir dengan ucapan pase. Adapun kehormatan yang diberikan kepada para sayid oleh orang Islam Indonesia itu bukan pengaruh mazhab Syi'ah. Dalam mazhab Sunny (*ahli sunnah wal jama'ah*) juga ada ajaran tentang penghormatan terhadap keluarga Nabi Muhammad saw. Yang disebut *ahlul bait*.⁴⁷

Sementara seminar tentang masuknya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan sebagaimana berikut :

1. Menurut sumber bukti yang baru, Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke-VII M./1 H. dibawa oleh para pedagang dan mubalig dari negeri Arab.
2. Daerah yang pertama dimasuki ialah pantai barat pulau sumatera yaitu daerah Baros, tempat kelahiran ulama bernama Hamzah Fansyuri. Adapun kerajaan Islam yang pertama adalah di Pase.

⁴⁶ Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, hlm. 132

⁴⁷ *Ibid.*

3. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan, dan proses itu berjalan secara damai.⁴⁸

Pada permulaan masuknya Islam di Indonesia belum ada pendidikan formal. Pendidikan masih berjalan sangat sederhana dan bersifat in-formal dan non-formal. Pendidikan non-formal saja masih langka yang disebabkan oleh pemahaman keluarga terhadap ajaran Islam relatif minim. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia mengetahui Islam sebatas membaca *syahadah* (aplikasi rukun iman dan Islam). Hal ini disebabkan oleh penerimaan masyarakat terhadap Islam secara dominan berjalan dengan pendekatan budaya (akulturasi) bahkan cenderung bersifat sinkritisme. Penyebab lain adalah, dikarenakan ajaran Islam baik aqidah, syariah dan ahlak mudah dimengerti sehingga tidak ada proses yang bersifat mempersulit.⁴⁹

Karena pemahaman keluarga terhadap ajaran Islam relatif minim, maka biasanya orang tua mengirim anaknya mengaji ke surau atau masjid untuk mendapatkan pengajaran agama dari guru ngaji. Perkembangan Islam yang cepat mendapatkan perhatian dari masyarakat --karena dalam perkembangannya Islam menjalin patronase dengan kerajaan -- kerajaan di wilayah nusantara-- menyebabkan surau atau masjid yang berfungsi pula sebagai tempat atau pusat pendidikan menjadi tidak dapat menampung siswa untuk mengaji. Maka didirikanlah pondok sebagai tempat pendidikan. Pertama kali sistem pondok ini disebut sistem mandala yang merupakan sistem pendidikan warisan agama Budha.⁵⁰ Meskipun di Timur tengah yang merupakan tempat lahirnya Islam ditemukan pula sistem pondok. Adapun materi pendidikan sistem pondok ini masih sebatas mengaji Alqur'an, belajar sholat dan sedikit tentang syariat Islam.

Bentuk yang formal baru muncul sekitar dua dasa warsa pertama abad ke-

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁰ Zuhairini dkk., *op. cit.*, hlm. 11.

XX. Sebagai ciri penyelenggaraan pendidikan formal ditandai dengan sistem klasikal, kurikulum, jadwal yang jelas, tujuan dan metode yang lebih terarah seperti yang dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912.⁵¹

Disinyalir bentuk pendidikan formal pada lembaga pendidikan Islam ini terpengaruh oleh sistem pendidikan Barat yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.⁵² Akan tetapi ada sinyalemen lain, bentuk pendidikan formal pada lembaga pendidikan Islam di Indonesia karena ada beberapa orang Indonesia yang mempelajari Islam di Malaysia, India dan Mesir yang juga mengenal bentuk pendidikan Barat.⁵³

Meskipun pendidikan Islam mengalami pergeseran atau perubahan bentuk menjadi formal (tidak semuanya) atas pengaruh sistem pendidikan Barat yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, akan tetapi bukan berarti ada hubungan yang harmonis antara umat Islam dengan kolonial Belanda. Bahkan sebaliknya, hubungan umat Islam dengan kolonial Belanda bersifat *rival* dan cenderung *antagonistik*. Oleh karena itu dalam catatan sejarah hubungan permusuhan ini ditunjukkan dengan adanya perang Diponegoro, Padri, Imam Bonjol dan lain-lain. Sehingga munculnya lembaga pendidikan formal ala sistem Belanda, semisal Madrasah (sebagai akulturasi tradisi Islam dengan budaya Barat) dan sekolah (yang merupakan cermin kelompok Islam modernis dan reformis) mendapat tantangan dari masyarakat yang anti terhadap budaya Barat yang tidak bisa menerima sistem Belanda.⁵⁴

Meski ada pro – kontra dalam persoalan sistem pendidikan Islam, akan tetapi satu hal yang patut dicatat bahwa perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam (formal) semakin pesat yang dipelopori oleh lembaga lembaga

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵² Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah, Jakarta*, LP3ES, 1994, hlm. 25.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 43-45.

atau organisasi Islam. Melihat perkembangan semacam ini, pemerintah kolonial Belanda menganggap lembaga pendidikan Islam cukup bahaya untuk dibiarkan. Karena disinyalir dapat menjadi kekuatan perlawanan terhadap kepentingan kolonial. Usaha untuk membelenggu agama dilakukan sebagai mana saran-saran Snouck Hugronje, agar pemerintah kolonial Belanda bersikap netral terhadap agama dengan tidak mencampuri dan memihak salah satu agama, dan supaya pemerintah kolonial Belanda membendung Pan-Islamisme yang sedang berkembang di Timur tengah dengan jalan menghalangi masuknya buku-buku atau brosur lain dari luar ke wilayah Indonesia.⁵⁵

Di samping itu sebagai bangsa penjajah pada umumnya mereka menganut pikiran Machiavelli yang berprinsip bahwa, *pertama*, agama sangat diperlukan bagi pemerintah penjajah. *Kedua*, agama tersebut di pakai untuk menjinakkan dan menaklukkan rakyat. *Ketiga*, setiap aliran agama yang di anggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan harus di gunakan untuk memecah belah dan agar mereka berbuat untuk mencari bantuan kepada pemerintah. *Keempat*, janji dengan rakyat tak perlu di tepati jika merugikan. *Kelima*, tujuan dapat menghalalkan segala cara.⁵⁶

Selanjutnya pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia, persoalan pendidikan Islam tidak diatur secara ketat. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada aturan yang mengikat bagi perjalanan dan perkembangan pendidikan Islam. Lebih dari itu justru pemerintah kolonial Jepang membentuk Departemen Agama untuk mengurus kepentingan-kepentingan agama. Artinya Jepang lebih bersikap akomodatif terhadap kepentingan agama.

Departemen Agama yang telah dirintis oleh pemerintah kolonial Jepang ini, pada awal kemerdekaan negara Indonesia, diberlakukan pula untuk menangani masalah-masalah agama yang di dalamnya termasuk mengenai

⁵⁵ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia, op. cit.*, hlm. 18.

⁵⁶ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam, op. cit.*, hlm. 147.

masalah lembaga pendidikan agama. Hingga akhirnya dibentuk kementerian agama, sekarang menjadi Departemen Agama.⁵⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, pasca kemerdekaan, untuk mengatasi persoalan keterpisahan --bahkan ketegangan hubungan- antara lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan umum pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan mutu pendidikan umum pada madrasah dan sekolah umum dengan diberlakukannya SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri, antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1976.⁵⁸ Sehingga sampai saat ini status antara lembaga pendidikan yang *berbackground* agama dan lembaga pendidikan umum disejajarkan dalam standar nasional.

C. Pendidikan Islam Kontemporer

Secara legal formal pendidikan Islam di Indonesia merupakan subsistem dari pendidikan nasional. Ia merupakan bagian yang integral dengan pendidikan nasional. Dalam UUSPN tahun 1989 telah di cantumkan secara tersendiri tentang pendidikan agama sebagai institusi yang otonom.⁵⁹ Akan tetapi otoritas lembaga agama tersebut bukan berarti terlepas dari pendidikan nasional.

Pendidikan Islam yang bersifat terakomodir dalam pendidikan nasional pada satu sisi memberi peluang terhadap umat Islam untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam. Akan tetapi pada sisi lain tidak bisa di hindari muncul dualisme dalam lembaga pendidikan yaitu lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan agama. Sementara pendidikan agama cenderung sempit eksklusif dalam pengkajiannya sedangkan pendidikan umum cenderung sekuler.

⁵⁷ *op.cit.*, hlm.22.

⁵⁸ *cp.cit.*, hlm. 25.

⁵⁹ UU RI Nomor 2 tahun 1989, *op. cit.*, hlm. 6.

Kalau pendidikan dikatakan sebagai proses memindahkan (*transmission*) budaya atau dalam istilah Syafi'i Ma'arif *Weltanschauung* (pandangan hidup tertentu).⁶⁰ Agar unsur-unsur pokok budaya (peradaban yang sesuai dengan pandangan hidup) dari generasi kegenerasi tetap *survive*, dalam Islam sebenarnya telah terjawab secara radikal. Apa yang harus dipindahkan dari generasi kegenerasi tidak menjadi persoalan, karena pandangan hidup Islam sudah jelas digambarkan dalam Alqur'an dan Assunah. Hanya saja yang menjadi masalah pokok adalah untuk menjawab bagaimana (*how*) maka dalam hal ini dibutuhkan jawaban yang relevan dengan tuntutan zaman.⁶¹

Sebenarnya sudah ada upaya untuk mengintegalkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Pendidikan agama (lembaga pendidikan Islam) tidak hanya membahas secara sempit diseputar lingkaran aqidah dan syarah Akan tetapi juga mempelajari bidang sains dan teknologi. Dalam hal ini Ismail Raji al-Faruqi yang berusaha untuk mengislamisasi pengetahuan agar tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan Islam. Selanjutnya, Al-Faruqi menegaskan bahwa, sistem pendidikan yang terbelah atas dua cabang, yang pertama sistem "modern" dan yang kedua sistem "Islam" hanya sebagai perlambang kejatuhan umat Islam.⁶² Oleh karena itu perlu adanya reformasi pendidikan, dan reformasi pendidikan hendaklah Islamisasi Pengetahuan modern itu sendiri.

Dalam dataran prakus selama ini upaya pengintegrasian antara pendidikan umum dengan pendidikan agama justru dalam istilah Rush Karim mengakibatkan ironi. Ketika pendidikan umum semakin berkembang pesat, justru pendidikan umum yang diberi embel-embel agama tidak mampu menampilkan citra dirinya secara tegas. Lebih lanjut Rush Karim mengatakan, pendidikan yang diberi embel-embel agama ini karena syarat beban dan sikapnya

⁶⁰ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Masalah Pembaruan Pendidikan Islam*, Yogyakarta, LPM UII, 1987, hlm. 1.

⁶¹ Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke- 21*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1988, hlm. 63.

⁶² Ismail Raji al Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984, hlm. ix-xi.

yang mendua bahkan semakin tidak begitu jelas orientasinya. Sehingga seolah-olah mempertontonkan dirinya sebagai pendidikan kelas dua atau pendidikan "murahan".⁶³

Menanggapi Istilah Islamisasi yang dikembangkan al-Faruqi, Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa, Islamisasi pengetahuan menjadi kehilangan makna, sebab yang perlu diislamkan itu bukan ilmunya. Tetapi adalah penggunaan menghancurkan diri manusia itu beserta peradaban yang telah diciptakanya selama berabad-abad. Lebih lanjut Ma'arif menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam tidak ada pemisahan antara apa yang disebut ilmu dunia dan ilmu agama. Alqur'an menjelaskan kepada kita bahwa sumber pengetahuan ada tiga, yakni alam semesta, diri manusia dan sejarah. Alam semesta, diri manusia dan sejarah adalah ayat-ayat Tuhan (lihat; misalnya *Surat Fushshilat* : 53, *Al-Hajj*: 46, *Al-Nahl*: 12, *Al-Jatsiyah* : 3-6).⁶⁴

Lain halnya dengan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dengan nada "beromantisme" sejarah, ia mengatakan bahwa ada tradisi keilmuan dalam Islam yang perlu diwarisi oleh umat Islam saat ini. Cukup banyak sejarahwan ilmu (*science historian*) yang menyebut peradaban Islam dizaman keemasanya sebagai "peradaban Islam".

Menanggapi dualisme ilmu yang saat ini menjadi *grand issue* umat Islam, Gus Dur mengatakan, kita bisa belajar dari sejarah. Disaat kelahiran dan perkembangan Islam, ilmuwan muslim harus menangani penghadapan sumber utama keimanan mereka (Alqur'an dan Hadits) terhadap wawasan ilmu pengetahuan serba kosmopolitan dari Hellenisme. Campur aduknya pemikiran ilmiah, terutama bidang filsafat antara filsafat Kristen awal, filsafat Yahudi, sisa-sisa filsafat Yunani (termasuk okultisme dari neo platonis), serta berbagai ajaran falsafat dari Timur (Macheianisme dan lain-lain). Para ilmuwan muslim saat itu

⁶³ M. Rush Karim, *Pendidikan Islam di Indonesia dalam Transformasi sosial budaya*, jogjakarta, PT. Tiara Wacana, 1991, hlm. 132.

⁶⁴ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *op. cit.*, hlm. 4.

meresponsi secara ekstensif dengan menyerap ilmu-ilmu filsafat yang berkembang tersebut dan meletakkannya dalam kerangka yang tidak saling menolak.⁶⁵

Selanjutnya Cak Nur (Nurcholish Madjid), mengutip Fazlur Rahman, mengatakan, para muslim memang tidak mungkin melakukan kerjasama dengan orang-orang bukan muslim, dalam hal ini terutama orang-orang Barat, untuk membuat interpretasi ajaran-ajaran agamanya khususnya isi kitab suci Alqur'an. Akan tetapi berkenaan dengan kajian aspek sejarah yang merupakan perjalanan internalisasi budaya dan peradaban yang termasuk didalamnya sejarah agama Islam, seorang muslim dapat sepenuhnya mengadakan kerjasama dengan para ahli dari kalangan mana saja.⁶⁶ Oleh karena itu, pengembangan pendidikan Islam kontemporer setidaknya bersikap inklusif terhadap perkembangan zaman tanpa mereduksi jatidirinya.

⁶⁵ Abdurrahman Wahid, *Thadisi Keilmuan dalam Islam*. Yogyakarta, LPM UII, 1987, hlm. 61.

⁶⁶ Nurcholish Madjid, *Literatur Ientang Islam dalam Bahasa Barat*, Yogyakarta, LPM UII, 1987, hlm. 71.

BAB IV

KONFLIK HORIZONTAL NU–MUHAMMADIYAH IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Dalam perspektif sejarah dan perkembangan sosiologis umat Islam, konflik antar pemeluk agama Islam, khususnya antara kelompok modernis (Muhammadiyah) dan tradisonal (Nahdlatul Ulama'), terwujud sebagai akibat terlibatnya unsur-unsur politik dalam perbedaan penafsiran ajaran. Selain karena faktor struktur sosial dalam kehidupan masyarakat di mana para pemeluk agama itu berada. Pada masa kelahiran gerakan modernis yang dipelopori Muhammadiyah tahun 1912, yang kemudian mendorong lahirnya NU tahun 1926.

Perbedaan penafsiran ajaran tersebut memang sangat dominan mempengaruhi hubungan tidak harmonis antara pengikut NU-Muhammadiyah, yang mengarah pada konflik. Dari perbedaan itu hingga kemudian memperoleh bentuk-bentuk baru melalui persilangan kepentingan politik sebagaimana dapat dilihat secara jelas pada masa orde lama dan orde baru.¹

Tetapi anehnya, konflik internal pemeluk agama tersebut justru sering lebih keras dan kompleks dari pada konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Sebab, sering kali terdapat kendali eksternal sehingga ada batas-batas kehidupan kolektif dalam tatanan masyarakat yang heterogen atau pluralistik. Sebaliknya, konflik internal pemeluk agama lebih keras karena merasa tidak ada lagi batas yang menjadi pengekang.²

Di sinilah tugas umat Islam untuk mengubahnya, setidaknya mengurangi kesenjangan itu. Kalau yang mengakui bahwa kesenjangan itu karena pemahaman ajaran agama secara ekstrim, maka cara memperbaharui yang paling efektif adalah melalui pendekatan agama. Sesama umat Islam agar tidak saling "menuding". Artinya, dengan agamalah tuding itu dilarang dan dengan dasar agama pula sikap toleransi di tekankan.

¹ Drs. Achmad Fedyani Saifudin MA, *Konflik dan Integrasi Perbedaan Fahaman dalam Agama Islam*, Jakarta, CV Rajawali, 1986, hlm. 96.

² Haeder Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 83.

A. Ketegangan-Ketegangan

Ketegangan sosial antara pengikut NU dan Muhammadiyah selama ini menjadi keprihatinan para tokoh pemuka agama kedua organisasi tersebut. Haeder Nashir, seorang tokoh muda Muhammadiyah, mensinyalir bahwa secara psikologis perbedaan pandangan yang dapat memicu konflik antara NU dan Muhammadiyah, disebabkan beberapa faktor.

Pertama, dikotomi modern dan tradisional. Sikap demikian tidak saja mencerminkan pandangan yang menganggap bahwa “wadahnya” yang paling sempurna. Namun juga mengakibatkan adanya enggan dalam berhubungan.

Kedua, melahirkan sikap serba eksklusif, tertutup dan jarang merasa perlu mengadakan kritik diri. Ketiga, “hobi” mengagung-agungkan prestasi masing-masing. Baik NU maupun Muhammadiyah, sama-sama mempunyai kebiasaan mempermasalahkan signifikan dan relevansi sosial dari takaran kerja prestasi. Lazimnya memunculkan hal yang disebut orogansi institusional.

Keempat, yang perlu dipikirkan secara serius adalah menarik signifikansi setiap kepedulian sosial budaya tidak semata-mata pada penekanannya kuantitatif. Tetapi pada sisi kualitatif seperti kemampuan membentuk komunitas dengan ciri-ciri demokrasi, terbuka, toleran, bersemangat, berinovasi, menciptakan iklim dialogis, kreatif, memperluas wawasan kemasyarakatan dan sejenisnya. Terakhir “cap organisatoris” yang mengacu pada penafsiran sejarah secara mekanistik dan apa adanya.³

Klaim kebenaran yang menyebabkan konflik tersebut seharusnya dihindari karena tidak ada yang untung dengan munculnya konflik-konflik. Sebaliknya, justru merusak citra agama yang mengajarkan manusia untuk hidup rukun dan lapang dada dalam menghadapi budaya sebagai suatu kenyataan sejarah.⁴

³ *Ibid.* hlm. 43.

⁴ Prof. Dr. A. Syafii Ma'arif, *Islam Kekuatan Doktrin dan Keberagamaan Umat*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 110.

Menurut Syafii Maarif, bila klaim kebenaran telah dipandang sebagai kebenaran yang mewakili Islam, maka bahaya fanatisme yang merobek-robek perumahan kesatuan umat sebagai akibat logis. Jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut maka akan menjadikan simbol egoisme dan subyektivisme seseorang dalam beragama. Akibatnya, ajaran Al-qur'an dan hadits yang substansi maknanya mengingatkan agar umat Islam bersatu sudah tidak relevan lagi.

Masalahnya sekarang, apakah mungkin masing-masing menganggap salah atau "tersesat" terhadap yang lain? Disinilah Ahmad Qodri Azizy, melihat sebagai inti pokok permasalahan. Jika hal ini belum bisa terjawab, maka ukhuwah itu masih merupakan khayalan.⁵

Sementara, Amin Rais, dalam anekdotnya mengatakan bahwa, suatu hari seorang kyai Muhammadiyah yang sangat fanatik tertidur pulas. Dalam tidurnya dia bermimpi masuk surga. Betapa kagetnya dia ketika jalan-jalan mengitari taman-taman yang indah di surga. Dalam mimpinya itu dia bertemu dengan temannya, seorang kyai NU fanatik juga. "Saya heran, kamu kok ada disini, padahal kamu kan suka tahlilan, baca ushali, dan qunut" sapa kyai Muhammadiyah itu. Sedangkan Kyai NU menyapa "Kamu yang tidak ikut tahlilan, tidak pernah baca usholi dan qunut kok bisa masuk surga."⁶ Anekdot ini mengisyaratkan bahwa ajaran agama tidak dapat dimonopoli oleh satu kelompok atas kelompok yang lain.

Pendekatan antar pemimpin merupakan bagian dari bentuk mengurangi ketegangan sosial internal umat Islam. Sebab, kedekatan itu dapat memperdekat jarak sosial antara kedua kelompok yang berbeda. Selain itu pendekatan tersebut juga dapat mengeliminasi pertentangan paham yang terjadi pada awal terjadinya konflik dan disintegrasikan, seperti masalah Talqin, Tahlilan, Slametan, Adzan Jum'at, Jumlah rakaat shalawat tarawih, bacaan Qunut, tempat salat Ied dan lain-lain.

⁵ Dr. Ahmad Qodri Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial*, Jogjakarta, LKIS, 2000, hlm. 19.

⁶ Abdul Rohim Ghozali (ed.), *Dua yang Satu, Muhammadiyah dalam Sorotan Cendekiawan NU*, Bandung, Mizan, 2000, hlm. 7.

Sebab, selama ini benturan faham keagamaan diperkuat oleh sikap menghadapkan perbedaan-perbedaan itu secara antagonis dan *ta'asub* golongan secara sempit. Masalah yang menjadi pokok perdebatan dan perselisihan berkisar pada masalah aqidah, ibadah dan tradisi keagamaan, serta kepercayaan-kepercayaan lama berhadapan dengan syirik, bid'ah dan khurofat.

Dalam masalah aqidah, yang dipertentangkan bukan masalah pokok yang berkenaan dengan rukun iman yang enam. Melainkan masalah dosa dan pahala bagi orang yang telah meninggal dunia kaitannya dengan Talqin, Tradisi, Slametan orang mati dan Nyadran. Sedangkan masalah ibadah juga bukan masalah pokok seperti rukun Islam yang lima, melainkan ibadah yang kecil-kecil. Bahkan tarasa remeh yang biasa disebut khilafiyah karena sifatnya yang mengundang debat dan diperselisihkan kepastian hukum atau cara mengerjakannya.⁷

Fenomena sosial menunjukkan bahwa, ada perbedaan pemahaman dan perilaku di kalangan pemeluk agama yang sulit untuk segera diselesaikan. Perbedaan pemahaman dan perilaku semacam itu hanya dapat direduksi melalui upaya-upaya jangka panjang. Itulah yang mewarnai kehidupan pemeluk agama.

Persepsi semacam itu telah menjadi budaya di tingkat pemeluk agama secara keseluruhan. Tidak hanya di kalangan umat Islam. Para pemeluk Kristen pun mengalami hal yang demikian. Secara hirarkis terdapat perbedaan marak terjadi di kalangan diri para pemeluk agama. Selain itu sikap apologi umumnya selalu saja mengarah kepada klaim kebenaran bahwa agamanya adalah yang paling benar.⁸

Mengerasnya klaim kebenaran umumnya bermula dari sikap pemeluk agama yang berpegang kuat terhadap suatu hasil interpretasi ajaran tertentu. Padahal, kemampuan akal dalam melakukan interpretasi

⁷ H. Syamsudduha, *Konflik dan Rekonsiliasi NU-Muhammadiyah*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1999, hlm. 135.

⁸ Ma'arif Jamuin, *Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*, Jogjakarta, Cisore Kerjasama dengan The Asia Foundation, 1999, hlm. 105-106.

terhadap sebuah teks selalu mengalami banyak keterbatasan. Selain juga karena kepentingan tertentu, produk interpretasi sering kali mengalami banyak distorsi. Oleh karena itu, sikap fanatik terhadap suatu hasil interpretasi atas teks sumber ajaran agama perlu dikoreksi kembali.⁹

Akibatnya, klaim kebenaran tersebut cenderung mengganggu dan menjauhkan agama dari misi sebenarnya, yaitu integrasi umat yang merupakan kebutuhan sosial yang diridloi Allah.¹⁰ Dengan klaim-klaim itu pula para pemeluknya pun akhirnya tersingkir dari bingkai *khalifah fil al-ard* atau *umatun wasathan*.

Konflik yang muncul antara NU dan Muhammadiyah, kaitannya dengan persoalan khilafiyah seperti Tahlil, Qunut dan lainnya, pada saat ini memang tidak setajam ketika Muhammadiyah memproklamkan diri sebagai organisasi pemurni ajaran Islam.

Namun demikian, friksi-friksi tersebut tetap saja ada di dalam setiap sanubari penganut organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu. Kenyataan ini secara tidak langsung jelas merugikan persatuan umat Islam, karena adanya saling tuduh menjadikan hubungan pengikut kedua organisasi menjadi tidak harmonis. Apalagi jika para pengikut tersebut mempunyai fanatisme organisasi yang sangat tinggi.¹¹

Masalah khilafiyah seperti keberterimaan NU dengan tahlil, sementara Muhammadiyah mengkampanyekan ajaran pemurni Islam, yang menolak tahlil. Akibatnya, timbul friksi mengarah pada ketidakharmonisan pada setiap sanubari penganut organisasi keagamaan terbesar. Kenyataan ini secara tidak langsung jelas merugikan persatuan Umat Islam. Adanya saling tuduh menjadikannya hubungan pengikut kedua organisasi menjadi tidak harmonis. Apalagi jika para pengikut tersebut mempunyai fanatisme organisasi yang sangat tinggi.

⁹ *Ibid.* hlm. 2.

¹⁰ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, Jakarta, LP3ES, 1987, hlm. 244.

¹¹ Zainuddin Fananie dan Atiq Sabardila, *Sumber Konflik Masyarakat Muslim Muhammadiyah-NU Perspektif Keberterimaan Tahlil*, Surakarta, Muhammadiyah University Press & The Asia Foundation, 2000, hlm. 3.

Muhammadiyah memberi rumusan bahwa tahlil merupakan perbuatan bid'ah. Secara tidak langsung tampaknya melukai perasaan warga NU. Sehingga tahlil kemudian menjadi isu perbedaan paham antara keduanya. Meskipun demikian, ketegangan yang muncul memang tidak bisa digeneralisasikan. Pada daerah-daerah tertentu misalnya tahlil bukan persoalan yang prinsip sehingga keberadaan bisa diterima oleh semua pihak baik anggota NU maupun Muhammadiyah. Meskipun di daerah lain, tahlil tidak jarang dipandang sebagai penyekat kerukunan umat.¹²

Pada daerah tertentu tersebut, tahlil justru menjadi isu sentral sampai-sampai muncul kenyataan banyak anggota NU yang lebih senang menyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen dari pada ke sekolah Muhammadiyah. Kenyataan ini juga merembet pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan Muhammadiyah, yang melibatkan umat Islam. Umumnya warga NU enggan untuk berpartisipasi. Semua hanya bermuara pada persoalan tahlil.

Prasangka yang muncul jika warga NU masuk dalam aktivitas yang dilakukan Muhammadiyah, takut dilarang melaksanakan tahlil. Meskipun secara hukum tahlil bukanlah masalah wajib. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut telah membawa dampak yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan sosio kultur dan politik.

Implikasi lain, kedua anggota organisasi keagamaan itu tidak pernah melakukan kerja sama dalam aktivitas agama seperti Pengajian, Tadarus, penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan Idul Adha.

Ajaran agama menjadi sumber intoleransi jika terjadi klaim dominasi kebenaran atas kelompok tertentu. Orang lain yang tidak sepaham dianggap salah, berdosa bahkan tidak jarang dikatakan kafir. Tidak ada kesadaran bahwa apa yang dianggap paling benar menurut cara pandangnya sendiri dan tertentu, sifatnya relatif. Sedangkan orang lain yang juga sama-

¹² Fenomena Perbedaan tersebut misalnya dapat di lihat di daerah Weleri, Kendal, Jawa Tengah, lihat Zainuddin Fananie, Atiqa Sabardila, *Ibid.*, hlm. 4.

sama memegang kebenaran berangkat dari cara pandang lain yang sifatnya sama-sama relatif pula.¹³

Akar dari masalah klaim kebenaran ini karena kurang mengertinya mana aspek ajaran yang absolut (mutlak) dan relatif (nisbi). Sehingga terjadi pemutlakan ajaran agama yang sebenarnya bersifat relatif. Lebih jauh dari itu, kadang-kadang terjadi pemaksaan untuk mengikutinya. Karena terdapat anggapan bahwa pemahamannya itu yang paling lurus dan paling benar.

Namun demikian, seperti apapun pandangan lurus dalam beragama dan betapapun sulitnya mereduksi kenyataan semacam itu tetap saja diperlukan upaya-upaya pelurusan. I'tikat ini berangkat dari satu keyakinan bahwa tidak ada satupun tafsiran atas dogma dalam agama yang dapat disebut sebagai mutlak benar.

Karena itu, untuk mencapai usaha mereduksi konflik klaim kebenaran atau upaya perelatifan hasil penafsiran diperlukan berbagai pendekatan. Pertama, pendekatan melalui pemberdayaan para pemeluk agama. Kedua, pendekatan melalui revisi produk penafsiran atas teks-teks dan dogma-dogma agama.¹⁴

B. Faktor Integrasi

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Karena terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama dan golongan. Meski selama ini kemajemukan tersebut dipahami sebagai kekayaan budaya nasional yang dibanggakan. Akan tetapi dalam kemajemukan itu sendiri seringkali tumbuh potensi konflik. Karena faktor-faktor kondisional dan struktural yang bersifat aktual dalam perkembangan masyarakat. Sehingga kemajemukan kemudian menjadi suatu yang bersifat dinamis tidak statis.¹⁵

Tantangan lebih berat lagi, pada abad 21 ini agama mengalami proses "Industrialisasi". Yakni, sebuah proses yang cukup berpengaruh

¹³ Drs. H. A. Syafii Mufid, MA dan Drs Munawar Fuad Noeh, *Beragama di Abad Dua Satu*, Jakarta, Zikrul Hakim, 1997, hlm. 88.

¹⁴ Ma'arif Jamuin, *op.cit.*, hlm. 105-106.

¹⁵ Haedar Nashir, *op.cit.*, hlm. 87.

terhadap reduksi nilai agama. Sehingga pemeluk agama kehilangan nilai-nilai kasih sayang. Tak pelak, agama cenderung terasing dari kehidupan sosial dan secara berangsur-angsur mengalami krisis relevansi.¹⁶

Berdasarkan persoalan tersebut diatas, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah bagaimana menciptakan dan membudayakan toleransi serta kerukunan. Dalam hal ini Dr Ahmad Qodri Azizi, menegaskan bahwa modal utama bagi warga NU dan Muhammadiyah untuk berukhuwah adalah kesamaan iman.¹⁷

Lebih lanjut, Qodri Azizi mengatakan bahwa agar kerja sama dapat terwujud maka NU dan Muhammadiyah harus bersedia menghargai masing-masing tradisi atau pola pikir yang dilakukan tanpa harus menuntut untuk menggagalkan identitas kedua organisasi itu. Berbicara mengenai identitas harus diterapkan sikap *agree in disagreement* (“setuju dalam perbedaan”).

Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab dan firqah-firqah Islam hanyalah pada masalah-masalah *furu'*. Masalah perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena timbul dari ijtihad atas pemahaman dan penyimpulan hukum yang dilakukan oleh Imam Mazhab. Jadi, merupakan sesuatu yang terpaksa (darurat).¹⁸

Beberapa langkah penting dan strategi untuk memupuk jiwa toleransi beragama dan membudayakan hidup rukun dapat ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, menonjolkan segi persamaan dalam agama dan sebaliknya tidak mendebatkan segi perbedaan dalam agama. Kedua, melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pengikut aliran agama yang berbeda.

¹⁶ Ungkapan tentang posisi Agama di luar kehidupan sosial dan tidak adanya konsep-konsep yang diberikannya dalam menyelesaikan problem-problem kemanusiaan, agama seakan terpenjara dalam hati pasif dan tidak teraktualisasikan dalam kehidupan nyata. Agama seakan hanya merupakan himpunan nilai, ide, norma, doktrin dan keyakinan yang tidak peduli terhadap kejadian dan problem sosial yang ada di sekitarnya. Baca: Drs H.A. Syafi'i Mufid, MA, Drs Munasor Fuad Noeh, *Beragama di Abad Dua Satu*, hlm. 72-73.

¹⁷ Dr. Ahmad Qodri Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial*, Jogjakarta, LKIS, 2000, hlm. 19.

¹⁸ Sayyid Muhammad Bin Ahmad Asy-Syathiri, *Persatuan Islam*, Bandung, PT Lentera Basritama, 1997, hlm. 13.

Ketiga, mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral *fiqhiyah* menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal *rabbaniyah*. Keempat, meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah. Serta kelima, menghidari sikap egoisme dalam beragama sehingga mengkalim dirinyalah yang paling benar.¹⁹

Iklim politik yang sedang berlaku juga memiliki peran andil besar mendukung potensi konflik. Meski demikian, mengamati pola hubungan NU-Muhammadiyah dalam perspektif sejarah sudah menunjukkan kemajuan saling pengertian. Kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini makin punya kesamaan pandangan dalam berbagai masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. Hambatan-hambatan psikologis yang dahulu ada sekarang sudah mencair. Kalaupun masih ada ketegangan, lebih karena kurang komunikasi, kurang silaturahmi.

Karena kurang komunikasi dan silaturahmi itu timbulah prasangka buruk. Penulis mensinyalir, persoalan ideologis sudah tidak relevan untuk diperdebatkan. Hanya klaim-klaim bahwa NU muncul sebagai antitesis dari Muhammadiyah yang mencoba menghapus tradisi, seharusnya diposisikan sebagai kekayaan khazanah Islam.

Komunikasi atau dialog menjadi penting terwujud. Hanya ketika tokoh agama bisa duduk sejajar, menyadari bahwa dunia milik bersama, hidup juga untuk dijalani bersama, dan persoalan manusia adalah juga persoalan bersama. Termasuk persoalan kebertuhanan dan masalah agama adalah ikatan cinta, simpati dan didasari rasa saling menghormati, saling mempercayai, serta masing-masing bersikap bisa dipercaya.²⁰

Jadi dalam dialog seseorang akan memberi dan menerima untuk bisa melakukan dialog secara dewasa dan produktif. Tentu saja diperlukan kesabaran, pengalaman, kepercayaan diri serta kematangan pribadi. Dialog

¹⁹ Lihat: Drs. Munawar Fuad Noeh (ed.), *op cit*, hlm. 91.

²⁰ Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed.), *op cit*, hlm. 43.

yang produktif tidak akan terwujud jika dari masing-masing partisipan tidak ada kesediaan untuk membuka diri, kesediaan saling memberi dan menerima secara sukarela dan antusias.

Semangat yang timbul menerima secara sukarela dan antusias agar pengikut NU dan Muhammadiyah, menjadi kekuatan yang satu. Untuk itu perbedaan yang ada ditingkat cabang, ranting (perbedaan kecil-kecil), sudah dianggap kurang begitu penting oleh kedua kelompok. Mencari persamaan bukan harus disatukan. Tapi juga tidak harus dicari perbedaan, sebab bisa makin melebar. Apabila yang dicari persamaan maka kedekatan kedua pihak makin dirasakan. Disini yang dipakai adalah ikhtilap *al-a'imma rahmat* (perbedaan pendapat umat adalah rahmat).

Sampai sekarang memang belum ada kegiatan sosial bersama antara NU–Muhammadiyah. Namun, sudah banyak tokoh yang berperan menyatukan NU–Muhammadiyah. Dari tokoh Muhammadiyah misalnya, ada Sutrisno Muhdain; Ahmad syafi'i Ma'arif dan lainnya. Sedangkan dari tokoh NU misalnya, Abdurrahman Wahid. Yang belum adalah dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Secara internal, kendala utama dalam membangun kerukunan hanyalah aspek historis. Sebab, sejarah masa lalu menunjukkan bahwa hubungan antar pemimpin NU dan Muhammadiyah, dikondisikan rezim Orde Baru agar tidak bersatu.

Pendekatan antar pemimpin itu ternyata dapat memperdekatkan jarak sosial antara kedua kelompok yang berbeda. Selain itu pendekatan tersebut ternyata juga dapat mengeliminasi pertentangan paham yang terjadi pada awal terjadinya konflik dan disintegrasi. Seperti tentang masalah Talqim, Tahlil, Slametan, Adzan Jum'at, Rakaat sholat tarawih, bacaan Qunut, tempat sholat Ied dan lainnya.

Sehingga, masing-masing anggota kelompok tetap dalam pendiriannya dan amalannya sendiri-sendiri. Tetapi merekapun dapat menerima dan menghormati perbedaan itu. Dengan sikap seperti itu toleransi dapat tumbuh dalam kehidupan sosial. Rerkonsiliasi antara dua

kelompok NU dan Muhammadiyah kembali terjalin dengan penuh *ukhuwah Islamiyah*.²¹

Kalangan neo modernis mempunyai keyakinan bahwa Islam di Indonesia memiliki potensi besar dalam memelopori pluralisme dan toleransi beragama. Hanya saja harus ada suatu usaha yang kontinyu dalam membina kerukunan seraya mencari penyelesaian secara damai ketika timbul konflik. Karena itulah program yang dikembangkan kalangan neo modernis tidak lain kecuali membangun kerja sama dan dialog antar umat beragama. Disadari oleh mereka, sifat *truth claim* memang selalu melekat pada diri pemeluk agama. Justru karena perbedaan pengalaman dan penghayatan keagamaan maka NU-Muhammadiyah, di mungkinkan adanya titik temu.

Gagasan pencarian titik temu ini mengarah menjadi dua segi. Pertama dialog teologis spiritual atau dialog intra religius. Dialog model ini baru memperoleh arti yang sesungguhnya apabila disertai keberanian para pemeluknya untuk mempertanyakan, mengoreksi diri sendiri dan memahami jantung pengalaman keagamaan orang lain. Jika ini dilakukan maka akan lahir pandangan keagamaan yang inklusif, terbuka dan tidak mudah menyalahkan keyakinan keagamaan orang lain.

Kedua, dialog sosial kemanusiaan. Antara pemeluk agama memberi corak masalah agama dan hubungannya dengan problem kemanusiaan yang terjadi. Kemudian berusaha secara bersama-sama mencari alternatif pemecahannya. Dalam dialog ini agama diminta merespons terhadap problem sosial konteporer, yang tidak lain ini menuntut peran kritis agama. Dalam hubungan ini tidak jarang terjadi kesamaan persepsi dan visi dialog tersebut selalu dikembangkan oleh kalangan neo modernis dalam rangka mengukuhkan konsep pluralisme agama di Indonesia.²²

²¹ H. Syamsudduha, *op.cit.*, hlm. 118.

²² Drs. Ahmad Amir Aziz M.Ag, *Neo Modernisme Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000, hlm. 62-63.

Meskipun ada beberapa gagasan bentuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara NU–Muhammadiyah, tidak dapat dengan mudah untuk dinikmati hasilnya secara cepat (Instan), melainkan memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab kompleksnya persoalan, ruwetnya aturan yang berkaitan dengan keberadaan kelompok etnik dan organisasi–organisasi keagamaan, bercampurnya kepentingan ekonomi dan politik ke dalam wilayah kelompok agama, serta luka–luka sejarah yang terlanjur mengkristal.

Pada hakekatnya seluruh umat manusia berada dalam bingkai keluarga besar kemanusiaan. Al–qur’an menyebutkan bahwa semula umat manusia itu merupakan satu umat, satu tujuan, satu haluan berupaya hidup baik berupaya menegakkan keadilan dan tidak saling menganiaya, bersatu, tidak bercerai–berai, hidup sejahtera dan bahagia. Tetapi karena mereka banyak yang berbalik haluan, berselisih satu sama lain, kerusakanpun timbul.

Untuk mengembalikan mereka menjadi baik kembali, Allah SWT mengutus para Rasul-Nya untuk menggembirakan yang mau kembali kepada kebaikan dan memperingankan yang tetap durhaka. Para Rasul di bekali Al-kitab oleh Allah SWT yang membawa kebenaran dan dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum terhadap perselisihan dikalangan umat manusia yang semula satu itu.²³

Untuk menghindari hubungan kurang harmonis antara NU dan Muhammadiyah, maka segera dihentikan sikap saling tuding kekurangan masing–masing. Lebih baik keduanya saling mengeratkan hubungan silaturahmi, perbanyak bekerja sama dalam memecahkan persoalan umat dan menimbulkan semangat saling mencintai satu sama lain, saling membantu atas dasar iman dan ikhlas menjalani hidup mengabdikan kepada Allah SWT.²⁴

²³ Q.S. 2: ayat 213.

²⁴ K.H. Ahmad Azhar Basyir MA, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung, Mizan, 1993, hlm. 285.

Jika paradigma pemikiran keagamaan yang lama lebih banyak menyangkut masalah fiqh, akidah, tafsir dan hadits yang sering lebih terkait dengan ibadah mahdhoh. Paradigma pemikiran keagamaan tersebut oleh generasi sekarang dirasakan masih sangat global dan dogmatis. Generasi sekarang menginginkan pemikiran keagamaan lebih luas cakupannya dan pada yang sudah mentradisi dalam literatur klasik.²⁵

Sikap yang dibutuhkan untuk meningkatkan *ukhuwah Islamiyah* di antara para pengikut setia NU dan Muhammadiyah adalah dialog dan toleransi. Hasil dialog dan toleransi akan menumbuhkan sikap erat, sikap saling memahami, saling menghargai yang sejati, saling percaya dan saling membantu dalam penghayatan agama.

Berhasil atau tidaknya hubungan dialogis dan toleran diperlukan syarat yang tidak mudah. Taraf pendidikan dan penguasaan cukup atas ajaran agama masing-masing merupakan syarat utama. Cara dialog dan toleransi berjalan dalam suasana terang jauh dari emosi dan superioritas diri. Pendapat diungkapkan jelas tetapi lembut dan bijaksana. Dalam dialog dan toleransi sikap saling percaya dan membangun tujuan bersama bukan untuk mencari kelemahan yang dimanfaatkan di luar dialog.²⁶

C. Tantangan Pendidikan Islam

Aspek pendidikan merupakan bagian terpenting untuk memberi kontribusi menciptakan kerukunan. Sayangnya, selama ini pendidikan agama Islam di Indonesia, masih berorientasi pada aspek fiqhiyah an-sich. Sehingga, *out put* pendidikan kurang peka terhadap persoalan sosial.

Mantan ketua PB NU yang juga mantan Presiden RI, KH Abdurrahman Wachid, mensinyalir bahwa orientasi pendidikan agama perlu dirubah. Yakni mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan

²⁵ Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, 2000, hlm. 113.

²⁶ A.M. Hardjono, *Penghayatan Agama, antara Otentik dan Tidak Otentik*, Jakarta, Kanisius, 1993, hlm. 116.

aspek sektoral fiqhiyah menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal rabbaniyah.

Menurut Gus Dur, kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai daerah tidak lain disebabkan kesalahan pendidikan. Kesalahan pendidikan yang dimaksud adalah terlalu kuatnya tekanan pendidikan pada masalah fiqih. Padahal, kajian terhadap fiqh akan mudah membukakan seseorang pada persoalan *ikhhtilafilah* (perbedaan). Akibatnya, siswa sejak dini sudah terkondisikan dengan masalah *furu'iyah* tersebut. Sementara itu, doktrin tauhid dan implikasi sosialnya tidak diberikan kepada siswa kecuali hanya sebatas menghafal *asmaul husna*. Sehingga siswa tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat. Dari sinilah akar mula tumbuhnya sikap fanatisme agama secara tidak proporsional.²⁷

Sementara itu pendidikan moral yang dipandu lewat pelajaran aqidah akhlak belum mampu membentuk kepribadian utama anak didik. Ranah afektif pelajaran aqidah akhlak jauh lebih kecil takarannya (belum seimbang) dengan ranah kognitif. Oleh karena itu tidak jarang ditemukan siswa yang secara serius menjalankan perintah agama dalam rukun Islam, seperti Sholat, Puasa, Zakat, dan Haji, tetapi juga rajin mencaci maki tetangganya yang tidak sepaham dalam beragama.

Produk pendidikan agama yang demikian jelas bukan tujuan pendidikan agama yang sebenarnya. Oleh karena itu, sudah waktunya memberikan pendidikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama secara sungguh-sungguh kepada anak didik sejak dari pendidikan dasar.

Agama boleh saja menawarkan jalan kebenaran tapi tidak boleh merasa paling benar. Agama boleh menawarkan jalan kemenangan, tapi tidak boleh cenderung ingin menang sendiri. Allah, yang memiliki agama boleh bersikap serba mutlak, tapi manusia cuma makhluk serba dila'if?²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 93.

²⁸ Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed.), *Passing Over. Melintasi Batas Agama*, Jakarta, PT Sun, 1999, hlm. 64.

Dengan tingkat kesadaran seperti ini bukan hanya toleransi yang dibangun, melainkan juga keterbukaan untuk menerima corak kebenaran lain. Pertanyaan yang muncul, dari mana kesumpekan cara pandang dan kemampuan wawasan macam itu lahir? Boleh jadi dari diri sendiri. Karena pemahaman terhadap sesuatu secara fanatik. Tetapi dapat juga lahir dari proses belajar. Karena sistem pendidikan lebih mengutamakan hafalan dan mengabaikan proses penalaran bebas.

Pendidikan agama sangat penting dan strategik dalam rangka menanamkan nilai-nilai spiritual Islam. Usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagamaan subyek didik agar lebih mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Implikasi dari pengertian ini, pendidikan agama Islam merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan Islam, bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pendidikan agama Islam berfungsi sebagai jalur pengintegrasian wawasan Islam dengan bidang-bidang studi (pendidikan) yang lain.

Tujuan pendidikan harus mampu menciptakan perubahan pada subyek didik setelah mengalami proses pendidikan. Baik pada tingkah laku, kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat dan alam sekitarnya. Dalam kajian sosial, setidaknya ada tiga paradigma keberagamaan.²⁹ Pertama adalah paradigma eksklusifisme. Paradigma ini berprinsip bahwa ajaran agama yang paling benar adalah yang dianutnya. Sedangkan ajaran yang ada di luar yang dianutnya adalah salah. Karena ia memahami bahwa dirinya yang paling benar maka yang salah harus dibenarkan.

Kedua adalah paradigma inklusifisme. Paradigma ini mempunyai prinsip bahwa ajaran agama yang benar adalah yang dianutnya. Akan tetapi bukan berarti harus memusuhi yang ada di luar keyakinannya. Hubungan dengan yang ada di luar ajaran agamanya bersifat toleran (saling hormat-

²⁹ Victor I Tanja M.Th, PhD, *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*, mJakarta, Cidesindo, 1998, hlm. 54.

menghormati). Rasa penghormatan tersebut cukup dengan perilaku tidak memusuhi terhadap yang lain.

Sedangkan ketiga adalah paradigma inklusif transformatif. Model ini membongkar sekaligus merubah paradigma lama yang dianggap cukup rawan konflik. Kalau sebelumnya hubungan agama sebatas toleransi maka paradigma ini berusaha menanamkan hubungan dialogis dan kooperatif (kerja sama).

Disinilah sebenarnya pendidikan Islam sebagai lembaga yang cukup strategis untuk ikut memberi kontribusi membangun kerja sama antara NU-Muhammadiyah. Terlebih khusus lembaga pendidikan yang secara sengaja dibentuk oleh organisasi NU dan Muhammadiyah. Tidak sebaliknya, proses pendidikan justru dibelokkan untuk mempengaruhi anak didik bersikap kontraproduktif. Karena itu, paradigma keberagamaan inklusif transformatif harus dijadikan roh kebersamaan.

Kalau pendidikan diartikan sebagai proses transmisi (perpindahan) budaya, maka dalam hal pendidikan agama yang perlu ditransmisikan tidak sekadar persoalan ritual. Persoalan yang bersifat ibadah sosial juga tidak kalah penting. Sebagaimana Johan Efendi mengatakan bahwa kesalahan sosial lebih penting dari pada kesalahan individual.³⁰

³⁰ Johan Efendi, *Spiritualitas Baru Agama dan Aspirasi Rakyat*, Jogjakarta, Interfidei, 1994, hlm. 6-7.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai diskripsi yang telah penulis sampaikan dalam kaitannya dengan persoalan Konflik Horisontan NU-Muhammadiyah Implikasinya terhadap Pendidikan Islam, maka akhirnya dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya konflik menyangkut faktor keagamaan, faktor psikologis dan sosiologis.

Konflik yang disebabkan faktor keagamaan biasanya dipicu adanya paham keagamaan yang dianggap sebagai kebenaran mutlak. Repotnya, paham tersebut oleh pengikutnya dipegangi secara kukuh, sempit dan kaku. Kemudian mengambil posisi berbeda dengan kelompok lainnya, sehingga timbul garis demokrasi "*minna waminhum*".

Masalah-masalah keagamaan yang sensitif menyangkut *furu'iyah*, *khilafiah*, *bid'ah* dan *khurafat*, digelar dan dipertentangkan secara terbuka dan eksklusif dalam masyarakat yang heterogen. Masing-masing kelompok yang berbeda paham keagamaan terlalu menurutkan hawa nafsu dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Sehingga mengabaikan ketentuan Al-qur'an dan Hadits tentang *ukhuwah Islamiyah*.

Sedangkan faktor psikologis dan sosiologis dipicu oleh perbedaan visi dan sikap politik. *Taasub* sempit terhadap organisasi atau partai serta paham yang diperjuangkan cenderung menganggap kelompok lain sebagai pesaing atau musuh. Politisasi agama dalam merebut jabatan strategis juga seringkali dijadikan alat ampuh khususnya di suatu komunitas yang berbasis penganut agama militan.

Melihat realitas perbedaan mendasar antara NU-Muhammadiyah tersebut, maka perlu wacana integrasi. Terwujudnya integrasi dapat diidentifikasi dalam beberapa faktor antara lain faktor keagamaan, psikologis dan sosial.

Pemuka agama berperan selalu berdiri di tengah umat secara adil, mengupayakan *ishlah*, melakukan pendekatan lewat kitab kuning secara seimbang dan tidak memihak kepada salah satu kelompok yang terlibat konflik. *Ishlah* bertujuan untuk mengedepankan amal usaha, menghindari konflik dan perpecahan di kalangan umat. Serta berusaha menyambung kembali silaturahmi.

Faktor psikologis dan sosilogis, dapat teratasai jika akal sehat mendominasi kesadaran dan penyesalan terhadap perilaku yang keliru pada masa lalu. Karenanya, pemimpin masyarakat yang toleran dan berwibawa dibutuhkan untuk mempertaut kembali jarak sosial anggota kelompok yang terlibat konflik. Mengembalikan interaksi sosial yang normal berlandaskan *ukhuwah Islamiyah*.

B. Saran

Beberapa hal yang ingin penulis tegaskan lagi dan sekaligus menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, khususnya lembaga pendidikan NU-Muhammadiyah dan masyarakat muslim pada umumnya yang memperhatikan dan mempunyai komitmen besar terhadap perkembangan pendidikan Islam antara lain;

1. Perlu meningkatkan *ukhuwah Islamiyah*. Kadar ukhuwah umat Islam dapat mencapai tingkat yang rendah, menjurus pada disintegrasi manakala masalah paham keagamaan ditanggapi tidak dengan pemahaman melainkan dengan emosi atau hawa nafsu terlebih jika visi politik diperjuangkan tanpa mengenal rambu-rambu Al-qur'an dan Hadits.
2. Kadar ukhuwah umat Islam dapat mencapai tingkat tinggi dan utuh serta tidak lagi sebatas *minna wa minhum*, manakala interaksi antar kelompok umat Islam dilaksanakan.
3. Perlu dikaji secara mendalam bangunan teoritik *wahdatul ummah*, integrasi dan ukhuwah umat Islam. *Wahdatul ummah* dapat terwujud dan tetap ada selama umat Islam bersedia merajut silaturahmi dan bersikap

mengedepankan amal usaha bukan pahan keagamaannya. *Wahdatul ummah* akan pecah dan tidak akan terwujud manakala kelompok-kelompok umat Islam yang terlibat konflik baik karena faktor perbedaan paham keagamaan, politik maupun kepentingan tidak mau menyadari akan kekeliruannya dan kembali menundukkan diri kepada Al-qur'an dan Hadits.

4. Untuk lebih menjamin terlaksananya kerukunan dan toleransi umat, maka perlu digalakkan berbagai langkah penting seperti dialog antar kelompok agama, kerjasama intem agama dan reorientasi pendidikan agama.

B. Penutup

Penulis menyadari bahwa akhir dari penelitian literer ini masih sebatas wacana. Oleh karena itu tidak mengenal kata *finish*, bahkan bisa jadi dalam perkembangan keilmuan pendidikan Islam saat ini merupakan sesuatu yang klasik. Meski sesuatu yang klasik bukan berarti tidak berguna sama sekali. Sebab, perjalanan sejarah akan selalu menguji setiap peristiwa-peristiwa yang dikerjakan manusia. Sejarahlah yang akan menghakimi sejalan dengan dinamisasi kehidupan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam era informasi global saat ini masih teramat banyak informasi yang belum penulis terima. Segala kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini mutlak adanya. Oleh karena itu sumbangan kritik dan saran senantiasa terbuka bagi penulis serta ucapan terimakasih selalu menyertainya.

Prinsip kebenaran mutlak yang punya hanya Allah, senantiasa menginternal dalam pribadi penulis. Manusia hanya mampu untuk merab-raba kebenaran mutlak tersebut. Sehingga sudah sepatutnya manusia hanya kebagian sandang kebenaran relatif. Demikian juga hasil dari penelitian ini penulis menyadari sebatas pada kebenaran relatif tersebut. Namun, kebenaran manusia yang relatif bukan untuk dikabutkan dan disalahgunakan. Relatifitas kebenaran setidaknya dijadikan sebagai bangunan sikap inklusif demi kemaslahatan umat manusia.

SUMBER ACUAN

- Abdullah Amin, *Studi Agama; Noematifitas atau Historisilas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdullah Shalih Abdurrahman, *Landasan dan Tujuan Pendidikan Menurut Alquran Serta Implementasinya*, Bandung, CV. Diponegoro, 1991.
- Abdullah Taufik, *Islam dan Masyarakat*, Jakarta, LP3ES, 1987.
- Abdullah Taufik, *Islam di Indonesia*, Jakarta, Tinta Mas, 1974.
- Achmadi, *Islam Sebagai Pradigma Ilmu Pendidikan*, Jogjakarta, Aditya Media, 1992.
- Akhwan Muzahofar, *Karakteristik, Tujuan dan Sasaran Pendidikan Islam*, Jogjakarta, Aditya Media, 1997.
- Al-Attas Al-Naqib Muhammad Syed, *Islam dan Sekularisme*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1981.
- Al-Faruqi Raji Ismail, *Islamisasi Pengetahuan*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984.
- Ali Fachry, *Islam Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural*, Bandung, Mizan, 1985.
- Al-qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Jakarta, 1981.
- Arifin H.M., *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994.
- Arifin, H.M., M.Ed., *Kapita Selekta Pendidikan, Jakarta*, Bumi Aksara, 1995.
- Ariyanto M. (ed.), *Melangkah dari Reruntuhan Tragedi Situbondo*, Jakarta, Grasindo PT Gramedia Widi Asarana Indonesia, 1998.
- Ashraf Ali Syed Dr., *Menyongsong Reruntuhan Pendidikan Islam*, Jakarta, Gema Falsafah, 1994.
- Asrofi Yusron M., *KH Ahmad Dahlan. Pemikiran dan Kepemimpinannya*, Jogjakarta, Hadinita 1983.
- Aziz Amir Ahmad Drs., M.Ag., *Neo Modernisme Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000.
- Azizy Qodri Ahmad Dr., *Islam dan Permasalahan Sosial*, Jogjakarta, LKIS, 2000.
- Backer Anton dan Zubeir Haris Ahmad, *Methodologi Penelitian Filsafat*, Jogjakarta, Kanisius, 1994.
- Basyir Azhar Ahmad, KH., M.A., *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung, Mizan, 1993.
- Benda J Harry, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1980.
- Bruinessen Van Martin Dr., *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Jogjakarta, LKiS dengan Pustaka Pelajar, 1994.
- Darajat Zakiyah dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991.
- Djamil Fatkhurrahman H., Drs., MA., *Metade Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos, 1995.
- Djohar, *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta, IKIP, 1999.
- Echols M. John dan Shadily Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1988.

- Ecip Sinasari S., Budairy Said, (ed.). *NU Khithah dan Godaan Politik*, Bandung. Mizan. 1996.
- Efendi Johan, *Spiritualitas Baru Agama dan Aspirasi Rakyat*, Jogjakarta, Interfidei, 1994.
- Fanie Zainuddin dan Sabardila Atiqa, *Sumber Konflik Masyarakat Muslim Muhammadiyah-NU Perspektif Keberterimaan Tahlil*, Surakarta, Muhammadiyah University Press & The Asia Foundation, 2000.
- Fatah Saefulloh Eep, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Fealy Greag dan Barton Greag (ed.), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan NU-Negara*, Jogjakarta, LKiS, 1997.
- Feisal Amir Jusuf, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.
- Fellard Andree, *NU Vis a Vis Negara*, Yogyakarta, LKiS, 1999.
- Ghozali Rohim Abd. (ed.), *Dua Yang Satu Muhammadiyah Dalam Sorotan Cendekiawan NU*. Bandung Mizan Pustaka, 2000.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang 1981.
- Hamka, *Ta'sawuf Perkembangan dan Pemurniannya*, Jakarta, Panji Mas, 1980.
- Hardjono A.M., *Penghayatan Agama, antara Otentik dan Tidak Otentik*, Jakarta, Kanisius, 1993.
- Hasil Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri Jatim 21-27 November 1999.
- Hasim Yusuf KH, *Sambutan Pengurus Besar NU*, Disampaikan dalam seminar NU-Muhammadiyah, Jogjakarta, 1993
- Hasyim Umar, *Muhammadiyah Jalan Lurus Dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi, Pendidikan, Kritik dan Terapinya*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1991.
- Hidayat Komarudin dan Gaus Ahmad (ed.), *Passing Over, Melintasi Batas Agama*, Jakarta, PT Sun, 1999.
- Hidayat Komarudin, *Post Modernisme Menolak Tuhan Epistemologis*, Amanah, 27 Mei-9 Juni 1994.
- Husein Sajjad Syed, *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*, Bandung, Gemarisalah Press, 1994.
- Ida Laude, *Gerakan Sosial NU Pasca Gus Dur Memoteret NU Mencari Alternatif* Jogjakarta, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) dan The Asia Foundation, 1999.
- Ilyas Yunar, Amin Mansur M. (ed.), *Muhammadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Keislaman*, Jogjakarta, Aditya Media, 1995.
- Jamu'in Ma'arif, *Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*, Jogjakarta, Cisore Kerjasama dengan The Asia Foundation, 1999.
- Karim Gafar A, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Jogjakarta, LKiS dan Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim Rusli (ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar, op. cit.*, 1997.
- Karim Rusli M., *Pendidikan Islam di Inlonesia dalam Transformasi sosial budaya*, Jogjakarta, PT. Tiara Wacana, 1991.
- Kuntowijoyo, *Menelan Cakrawala*, Yogyakarta, Salahudin Press, 1981.

- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang, 1997.
- Langgulong Hasan, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke- 21*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1988.
- Ma'arif Syafi'i Ahmad, *Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Ma'arif Syafi'i Ahmad, *Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan*, Jogjakarta, 1991.
- Ma'arif Syafi'i Ahmad, *Masalah Pembaruan Pendidikan Islam*, Yogyakarta, LPM UII, 1987.
- Ma'arif Jamuin, *Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*, Jakarta, Cisore Kerja Sama dengan The Asia Foundation, 1987.
- Madjid Nurcholish, *Bahaya Kultus dan Fundamentalisme*, Tekad, No. 14/ Tahun I, 9-15 Agustus 1999.
- Madjid Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta, Paramadina, 1995.
- Madjid Nurcholish, *Literatur Ientang Islam dalam Bahasa Barat*, Yogyakarta, LPM UII, 1987.
- Malik Djamaludin Dedy, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Marimba D Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1981.
- Marimba D Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, PT. Alma'arif, 1981.
- Materi Dasar NU Kelas 1, Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif Jateng, 1994.
- Mufid Syafi'i, H.A., Drs., M.A., dan Noeh Fuad Munawar, Drs., (ed.), *Beragama di Abad Dua Satu*, Zikru Al Hakim, Jakarta, Kelompok Ghalia Indonesia, 1997.
- Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam*, Solo, Ramadhani, 1991.
- Muhammad Sayyid Bin Ahmad Asy-Syathiri, *Persatuan Islam*, Bandung, PT Lentera Basritama, 1997.
- Mulkhan Munir Abdul, *Pemikiran KH Achmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Nashir Haeder, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Noer Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1980.
- Pasha Kamal Mustafa Drs., (ed.), *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, Jogjakarta, LPPI UMY, 2000.
- Qutub Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung, PT. Al- Ma'arif, 1993.
- Saifudin Fedyani Achmad, *Konflik dan Integrasi Fahaman dalam Agama Islam*, Jakarta, CV Rajawali, 1986.
- Saifullah, *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta, Grafiti, 1997.
- Salam Junus, *KH Ahmad Dahlan, Amal dan Perdjoengannya*, Jakarta, Depot Pengajaran Muhammadiyah, 1968.
- Soekanto Soerjono DL., Prof., *Kamus Sosiologi Edisi Baru*, Jakarta, PT Raja

- Grafindo. Persada, 1993.
- Soewarno Poespo Margono, *Gerakan Islam Muhamadiyah*, Jogjakarta, Persatuan Offset, 1995.
- Somad Burlian, *Beberapa Persoalan Dalam Pendidikan Islam*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Steenbrink A. Karel, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta, LP3ES, 1994.
- Su'ud Abu, *Reformasi Pendidikan Sebuah Keharusan*, Disampaikan dalam Seminar Pendidikan, Magelang, 31 Mei 1999.
- Suaedy Ahmad dan Abdalla Abshar Ulil (ed.), *Gila Gus Dur*, Jogjakarta, LKiS, 2000.
- Sumargono S., *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jogjakarta, Nur Cahaya, 1983.
- Syamsudduha, H., *Konflik dan Rekonsiliasi NU-Muhammadiyah*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1999.
- Syari'ati Ali, *Agama versus "agama"*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1994.
- Syari'ati Ali, *Islam Agama Protes*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1991.
- Tafsir Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1992.
- Tafsiri Ahmad, *Epistimologi Untuk Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung, IAIN Sunan Gunung Jati, 1995.
- Tanja I Victor, MTh, Ph.D, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial*, Jakarta, Pustaka Cidesindo, 1998.
- Thohuri Djamilun H.M., Drs., BA., *Pelajaran ke-NU-an kelas 2 SLTP Ma 'arif Jateng*, Semarang, CV Wicaksono, 1988.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pendidikan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1990.
- Topatiomasang Roem, *Sekolah Itu Candu*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- UU RI Nomor 2 Tahun 1989, *Sistem Pendidikan Nasional*, Semarang, Aneka ilmu, 1992.
- Wahid Abdurrahman, *Thadisi Keilmuan dalam Islam*. Yogyakarta, LPM UII, 1987.
- Wijdan Aden SZ, *Orientasi dan Cita-Cita Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Aditya Media, 1997.
- Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta, Depag, 1986.
- Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992.